



DRAF RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019



INSPEKTORAT PROVINSI NTB TA. 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan. RENJA adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2019 yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan Potensi, tantangan Peluang dan kendala yang dihadapi.

RENJA ini nantinya akan menjadi acuan dalam implementasi dan evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rencana Kerja Tahun 2019. Melalui RENJA ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Akhirnya, semoga dokumen RENJA ini bermanfaat bagi optimalisasi pencapaian program Inspektorat dan akuntabilitas pelaksanaannya. Aamiin

Mataram, 2018
INSPEKTUR PROVINSI NTB,

IBNU SALIM, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681231 199403 1 070

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Good Governance, merupakan harapan dan cita-cita bagi setiap tingkatan Pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya dan langkah penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, serta kondisi ini akan bermuara bagi terlaksananya Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Karena itulah, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun RENJA Tahun 2019, sebagai landasan dan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019.

INSPEKTORAT PROV. NTB

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 1

 1.3. Maksud dan Tujuan 2

 1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI NTB TAHUN LALU 4

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB 5

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi NTB 7

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi NTB 7

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 11

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB 23

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Provinsi NTB 23

 3.3. Program dan Kegiatan 26

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB 27

BAB V. PENUTUP 41

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. PETA PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2019
2. ANGGARAN KAS DPA INSPEKTORAT PROVINSI NTB TAHUN 2019

INSPEKTORAT PROV. NTB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan. Penyusunan Renja Inspektorat selaku SKPD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD sesuai rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Substansi materi rancangan Renja SKPD telah melalui proses pembahasan pada forum SKPD mencakup :1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi;2) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; 3)Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan 4) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 adalah merupakan dokumen yang menjadi dasar perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB. Sedangkan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka dengan merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program yang dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

b. Tujuan

Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, sekaligus menjadi acuan dalam penentuan pilihan - pilihan. Disamping itu, dokumen Renja digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi program kegiatan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Pasal 143 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Renja Inspektorat Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja

BABII. HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI NTB TAHUN LALU;

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi NTB
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi NTB
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB;

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Provinsi NTB
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB V. PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

Perubahan paradigma Manajemen Pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan UU 23 tahun 2014. Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Negara yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Terbitnya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, maka Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mencapai Peraturan PerUndang-Undangan tersebut diatas, Inspektorat Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Provinsi NTB .
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Kompeten.
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas.
3. Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai.
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang Berkualitas.
5. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Baik.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi NTB telah dikerahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Pada tabel berikut ini gambaran dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB dan pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB dapat diketahui dari uraian tabel 2.1 tentang Data Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB s/d Tahun 2018 sampai dengan Bulan Februari 2018 (Terlampir 2.1).

Pada Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 terdapat total anggaran yang telah terealisasi sebanyak Rp.546.032.327,-. Dengan Rincian sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.332.450.000,-; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.0,-; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp.0,-; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar Rp.0,-; Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.0,-; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp.169.782.327,- ; Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp.43.800.000,-.

Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdapat 9 kegiatan PKPT. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Asistensi Laporan Keuangan, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAP DAN RKA, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Reguler Kab/Kota se NTB, Evaluasi LAKIP Provinsi, Evaluasi SPIP, EPPD Evaluasi LAKIP Kab/Kota se NTB, Reviu LAKIP. Sedangkan untuk Non PKPT terdapat 15 kegiatan sebagai berikut: Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK), Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKWBBM), Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB), Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/Kasus Pengaduan, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Tim Penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Unit Gratifikasi, Peningkatan Level, Maturity Pemda, Pembinaan SKPD, Penilaian SKPD, Bimbingan Teknis, Unit Layanan Pengaduan dan Unit Layanan Konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi NTB

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi NTB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Provinsi NTB harus dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan informasi tentang prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1.	Informasi	Permintaan Informasi terkait dengan kinerja SKPD	Masyarakat, LSM
2.	Khusus	Penyelesaian kasus melalui pemeriksaan khusus	Masyarakat, SKPD
3.	Pengaduan Masyarakat	Pemeriksaan dan Penyelesaian atas pengaduan masyarakat	Masyarakat
4.	Konsultasi	Memberikan konsultasi dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan program	SKPDlingkup provinsi

Untuk gambaran perjanjian kinerja pelayanan pada Inspektorat Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT PROVINSI NTB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Kompeten.	1. Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor 2. Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat P2UPD	28.33% 37.56%
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	1. Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP 2. Opini BPK	100% WTP
3	Terwujudnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai.	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPIP. 2. Tingkat Maturitas Pemda NTB	75.56% Peringkat 3
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang berkualitas.	1. Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 3. Tingkat Kapabilitas APIP 4. Persentase Penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan	60% 80% Level 3 22.22%
5	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik.	1. Hasil Nilai PMPRB NTB 2. Persentase SKPD yang membangun WBK/WBBM/ZI	65 4.4%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata >60 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.	80% 65

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 6.788.606.100	Sumber Dana: APBD Mendukung Sasaran Strategis no. 2,3,4,5,6. indikator kinerja no 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 318.251.000	Sumber Dana: APBD Mendukung Sasaran Strategis no. 1, indikator kinerja no. 1,2

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / KETERANGAN
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	1. Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP 2. Opini BPK	- Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Sesuai SAP/Jumlah SKPD x 100% - Hasil Sesuai Opini BPK terhadap LKPD
2.	Terwujudnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai.	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPIP. 2. Tingkat Maturitas Pemda NTB	- Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP/Jumlah SKPD x 100% - Hasil Penilaian dari BPKP
3	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang	1. Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil	- Jumlah Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan/Jumlah

	berkualitas.	pengawasan. 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 3. Tingkat Kapabilitas APIP 4. Persentase Penilaian SKPD yang Memuaskan	seluruh rekomendasi x 100% - Jumlah Pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%. - Hasil Penilaian BPKP - Jumlah SKPD yang memiliki Penilaian Sangat Baik/Jumlah SKPD x 100%
4	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik.	1. Hasil Nilai PMPRB NTB 2. Persentase SKPD yang membangun WBK/WBBM/ZI	- Hasil Penilaian Tim Asesor yang di bentuk oleh Pemda NTB. - Jumlah SKPD yang telah membangun WBK/WBBM/ZI / Jumlah SKPD x 100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata >60 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.	- Jumlah SKPD yang hasil evaluasi AKIP/Jumlah SKPD x 100%. - Hasil Penilaian Kemen PAN dan RB.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi NTB

Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik seiring dengan kecenderungan perubahan perbaikan budaya kerja birokrasi secara nasional. Prinsip *service oriented* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi. Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin pengelolaan administrasi dan keuangan, serta

peningkatan partisipasi masyarakat selama ini telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.

Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum dapat menghilangkan beberapa perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan intern pemerintah senantiasa dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi di Provinsi NTB secara terus menerus.

Kondisi pada Tahun 2016 total jumlah Rekomendasi sebanyak **17.169** dan telah ditindak lanjuti sebanyak **11.620** dan dalam proses sebanyak **1.635** sehingga masih terdapat rekomendasi sebanyak **3.884** rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan total nilai kerugian Negara/Daerah (01) sebesar **Rp. 214.089.257.916,11** yang berhasil ditarik sebesar **Rp. 174.949.812.987,99** dan sisa yang belum bisa ditarik sebesar **Rp. 39.139.444.928,12**. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain :

- Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan relative kurang
- Pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahan belum maksimal
- Komitmen pimpinan unit kerja atas tindak lanjut hasil pemeriksaan masih kurang
- Belum ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh atasan langsung kepada pimpinan unit kerja yang tidak menindaklanjuti temuan
- Seringnya pergantian pejabat, PPK, PPTK, pengelola keuangan/pemegang kas, sehingga terjadi kesalahan berulang sebagai akibat minimnya pemahaman ketentuan perpajakan, tunjangan keluarga dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam pengelolaan keuangan.

Kondisi lainnya yang dapat digambarkan adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan mulai meningkat sebagai akibat bergulirnya reformasi. Kepekaan masyarakat semakin tinggi, masyarakat semakin berani untuk melaporkan adanya dugaan praktek penyimpangan. Fungsi-fungsi pengawasan tersebut dilakukan secara pribadi dan juga disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terhadap

hal diatas Inspektorat Provinsi NTB memberikan respon yang positif dan menindak lanjuti setiap laporan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan merupakan kecenderungan positif apabila ditinjau dari sisi peningkatan Pengawasan Masyarakat (WasMas), disisi lain hal ini juga dapat menjadi tolok ukur terhadap efektifitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Reaksi ini terjadi antara lain karena adanya kemungkinan kelemahan-kelemahan dalam sistem atau prosedur pengawasan, serta kurang memadainya pengalokasian sumber daya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Visi Provinsi NTB terwujudnya masyarakat NTB yang BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING dan SEJAHTERA

Makna Visi

- **MASYARAKAT NTB**
SELURUH MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
- **BERIMAN**
TAAT BERAGAMA, BERBUDI PEKERTI LUHUR DAN TOLERAN
- **BERBUDAYA**
SADAR BUDAYA DAN MEMELIHARA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
- **BERDAYASAING**
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SERTA MASYARAKAT SEHAT, CERDAS PRODUKTIF, INOVATIF, KREATIF
- **SEJAHTERA**
TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR (EKONOMI, SOSIAL DAN KEADILAN)

Visi Pemerintah Provinsi NTB “**Terwujudnya Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Sejahtera**” merupakan cita-cita seluruh lapisan birokrasi dan masyarakat Provinsi NTB. Visi tersebut hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menetapkan kondisi ideal yang diharapkan menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagi Inspektorat kiranya “Pemerintahan Daerah yang bersih” dan “Supremasi Hukum” merupakan kata kunci yang mengajak seluruh elemen dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar, Inspektorat akan menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendukung utama tercapainya visi Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintahan Daerah yang bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korup, kolusif dan nepotis. Pemerintahan bersih hanya dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum, akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang professional dengan berorientasi pada masa depan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah payung hukum yang menjadi dasar yang kuat dan menghilangkan keraguan dalam memberantas praktek penyimpangan tanpa pandang bulu. Peluang untuk melakukan kehendak Undang-Undang tersebut menjadi lebih besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan penyimpangan akan lebih maksimal dengan adanya prosedur yang ketat dan teratur. Untuk itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi faktor pendukung dalam memperbesar peluang Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 akan mengurangi masalah Kerugian Negara dan Kewajiban Penyetoran kepada negara yang disebabkan oleh kelalaian Pemegang Kas (Bendahara). Karena Undang-Undang ini mewajibkan pengangkatan Bendahara dalam jabatan fungsional, sehingga akan terjadi peningkatan pemahaman para Bendahara terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Disamping itu seringkali pergantian pejabat bendahara akan bisa dikurangi.

Disamping peraturan per-Undang-Undangan yang dapat memberikan dukungan, ada pula Undang-Undang yang memberikan tantangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tantangan penerapan aturan ini akan dialami pada tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tetap berdampak positif terhadap kesempurnaan administrasi keuangan pemerintah.

Dengan memahami peluang dan tantangan tersebut maka kesiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan akan lebih mantap. Pada akhirnya pencapaian cita-cita tersebut dapat menunjukkan kecenderungan umum berupa :

- Menurunnya kasus yang merugikan Negara
- Meningkatnya Disiplin Kepegawaian, Administrasi, Anggaran dan Perpajakan
- Menurunnya pelanggaran terhadap Peraturan perUndang-Undangan dan Prosedur/Tata Kerja yang berlaku pada umumnya
- Membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam aspek pembiayaan, prosedur dan jangka waktu pelayanan.

Dalam perspektif yang lebih sempit, berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain :

- Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari PerUndang-Undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi.
- Meningkatnya persentasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan tepat waktu.
- Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah.
- Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- Terselainya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat.
- Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi.

Tabel 2.5

Analisis Internal dan Eksternal

Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Fungsi Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting (S1) 2. Adanya pendukung operasional (S2) 3. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan (S3) 4. Adanya dasar hukum yang jelas dan tetap untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (S4)	1. Kurangnya prasarana penunjang mobilitas (W2) 2. Anggaran yang dirasa masih kurang untuk mendukung pencapaian program (W3) 3. Masih sedikitnya auditor dan P2UPD (W4)
OPPORTUNITIES (O)	SO	WO
1. Aparat pemeriksa yang professional 2. Menurunnya tingkat penyimpangan SKPD Prov/Kab/Kota	1. Optimalisasi peran pemeriksa dalam mendukung fungsi Inspektorat 2. Optimalisasi sarana pendukung, anggaran, dan dasar hukum untuk menurunkan tingkat penyimpangan SKPD	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas yang professional 2. Meningkatkan sarana pendukung mobilitas dan penunjang pengawasan
TREATH (T)	ST	WT
1. Hasil pemeriksaan belum memenuhi harapan masyarakat 2. Terpublikasinya informasi yang bersifat rahasia 3. Korupsi	1. Meningkatkan entitas dan kualitas pemeriksaan 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagai langkah penguatan informasi	1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait 2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD sebagai auditan dan lembaga terkait sebagai APEP/APIP 3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Satuan kerja Inspektorat Provinsi NTB dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Provinsi NTB.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.6 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 pada satuan kerja Inspektorat Provinsi NTB dibawah ini.

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Inspektorat Provinsi NTB

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Se-NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa surat menyurat • Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	38.410	Penyediaan jasa surat menyurat	Se-NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa surat menyurat • Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	34.400	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	213.620	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	213.620	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Opini BPK WTP	100%	214.120,72	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Opini BPK WTP	100%	146.106	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	73.040	Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	68.559	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. NTB	Persentase realisasi anggaran jasa kebersihan kantor	100%	110.063,25	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. NTB	Persentase realisasi anggaran jasa kebersihan kantor	100%	136.591	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017

			• Persentase SKPD yang menerapkan SPIP					• Persentase SKPD yang menerapkan SPIP			
	Penyediaan alat tulis kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran alat tulis kantor • Tingkat kapabilitas APIP	100%	158.889,405	Penyediaan alat tulis kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran alat tulis kantor • Tingkat kapabilitas APIP	100%	138.165	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa cetak dokumen, blanko, arsip, atau file penting lainnya • Tingkat Kapabilitas APIP	100%	89.956,68	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa cetak dokumen, blanko, arsip, atau file penting lainnya • Tingkat Kapabilitas APIP	100%	78.223	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	11.609,4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	10.554	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Penyediaan makanan dan minuman	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran makanan dan minuman • Tingkat Kapabilitas	100%	60.000	Penyediaan makanan dan minuman	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran makanan dan minuman • Tingkat Kapabilitas	100%	70.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017

			APIP					APIP			
	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan daerah	Luar Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	100%	588.534,235	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	100%	407.049,6	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran • Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	2.373.415	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran • Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	2.476.400	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	100%	99.130	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	100%	136.200	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					

	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran perlengkapan gedung kantor yang menunjang kegiatan kedinasan - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	533.485,7	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran perlengkapan gedung kantor yang menunjang kegiatan kedinasan - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	129.160	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	216.425	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	205.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	50.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	70.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Pembinaan	Prov.	Persentase	100%	51.425	Pembinaan	Prov.	Persentase	100%	25.900	Kebutuhan

	mental dan fisik aparat	NTB	realisasi anggaran Pembinaan mental dan fisik aparat • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP			mental dan fisik aparat	NTB	realisasi anggaran Pembinaan mental dan fisik aparat • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP			dana sesuai dengan DPA 2017
	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kepegawaian • Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	103.175,82	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian • Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	88.038,8	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB	100%	21.804,75	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB	100%	21.805	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017

	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	92.345	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	56.864	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60	100%	42.594,75	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60	100%	39.923	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
5	Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah					Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah					
	Peningkatan Manajemen asset/barang milik daerah	Prov. NTB	- Persentase hasil pelaksanaan manajemen asset/barang milik daerah - Opini BPK	100%	43.318	Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Prov. NTB	- Persentase hasil pelaksanaan manajemen asset/barang milik daerah - Opini BPK	100%	36.928	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian					

	Pelaksanaan Kebijakan KDH					Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Se-NTB	• Jumlah pelaksanaan hasil pemeriksaan sesuai dengan jumlah obyek yang diperiksa • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	12 Kali	3.921.059,104	Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Se-NTB	• Jumlah pelaksanaan hasil pemeriksaan sesuai dengan jumlah obyek yang diperiksa • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	12 Kali	2.513.881	Kebutan dana sesuai dengan DPA 2017
	Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Se-NTB	• Jumlah pelaksanaan AD PPK • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	1 tahun	800.000	Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Se-NTB	• Jumlah pelaksanaan AD PPK • Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	1 tahun	479.309,877	Kebutan dana sesuai dengan DPA 2017
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Se-NTB	• Persentase tindak lanjut atas temuan Pengawasan • Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	100%	653.106,491	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Se-NTB	• Persentase tindak lanjut atas temuan Pengawasan • Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	100%	636.070,723	Kebutan dana sesuai dengan DPA 2017

	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan • Hasil Nilai PMPRB NTB • Jumlah SKPD yang membangun WBK/WBB M • Tingkat Maturitas Pemda • Tingkat Kapabilitas APIP • Satgas Saber Pungli	100%	1.754.008,225	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan • Hasil Nilai PMPRB NTB • Jumlah SKPD yang membangun WBK/WBB M • Tingkat Maturitas Pemda • Tingkat Kapabilitas APIP • Satgas Saber Pungli	100%	3.159.344,5	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Luar dan Dalam Prov. NTB	• Persentase tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat jabatan Fungsional auditor • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor • Persentase Aparatur	1 tahun	274.158,5	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Luar dan Dalam Prov. NTB	• Persentase tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat jabatan Fungsional auditor • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor • Persentase Aparatur	1 tahun	255.722	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017

			Pengawas yang bersertifikat P2UPD • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor Kepegawai-an					Pengawas yang bersertifikat P2UPD • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor Kepegawai-an			
	Kegiatan Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Se-NTB	• Kualitas kinerja APIP Inspektorat • Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60 • Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi NTB	60 orang	96.629	Kegiatan Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Se-NTB	• Kualitas kinerja APIP Inspektorat • Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60 • Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi NTB	60 orang	62.529	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2017

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk Inspektorat Provinsi NTB tidak melalui MUSRENBANG, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat, dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari Satuan Kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi NTB, maupun ditingkat Nasional. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat Provinsi NTB mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan lebih meningkatkan program kegiatan terutama Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

dengan melakukan pembinaan, asistensi, pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Ulasan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Inspektorat Provinsi NTB

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

INSPEKTORAT PROV. NTB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional diupayakan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB.

Untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi NTB tahun 2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Sejahtera”, maka usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2014-2018 sebagaimana yang tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan tahun 2014-2018.

Dalam perspektif inilah, Inspektorat Provinsi NTB memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB, sekaligus terwujudnya “pemerintahan daerah yang bersih” dan “supremasi hukum”.

Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih merupakan wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang terhindar dari praktek korupsi, kolusif dan nepotism melalui penegakkan hokum. Pengembangan pola transparansi dan partisipasi publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang professional dan akuntabel.

3.2. Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 adalah terwujudnya pelaksanaan dan pengawasan internal di SKPD Provinsi dan Pembinaan Pengawasan di SKPD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Sasaran Renja tertuang dalam Program Kegiatan Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi NTB yang sejalan dengan RPJMD Provinsi NTB 2014 – 2018.

Program dan kegiatan Strategis Inspektorat Provinsi NTB 2014 – 2018 (khusus pada tahun 2018) adalah program 5 dan 6 dari 7 program yang ditetapkan ;

5. Program Peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, meliputi :

1) Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala ini adalah merupakan penjabaran dari tugas pokok dari Inspektorat Provinsi NTB selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi NTB. Pada tahun 2018 Pengawasan direncanakan dengan berbasis resiko menggunakan 8 indikator untuk menentukan SKPD yang paling berisiko. Delapan indikator tersebut antara lain:

- Anggaran belanja keseluruhan
- Waktu terakhir diaudit
- Jumlah temuan tahun lalu
- Jumlah program dan kegiatan
- Anggaran pendapatan
- Jumlah SDM
- Persentase Tindak Lanjut Temuan
- Evaluasi SAKIP

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Reguler Berbasis Risiko (Dinas, Badan, Biro, PU, Kantor Penghubung, Dana Desa, Dana BOS, Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa)
- b. Asistensi Laporan Keuangan
- c. Reviu Laporan Keuangan
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- e. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)
- f. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- g. Reviu Rencana Strategis (Renstra)
- h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se Provinsi NTB ataupun Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
- i. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- j. Evaluasi Pengarusutamaan Gender SKPD
 - k. Pembagian dan Evaluasi Zona Integritas
 - l. Pengembangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM)
 - m. Penegakkan Integritas
 - n. Pencegahan Saber Pungli
 - o. Penilaian SKPD
 - p. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - q. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - r. Maturitas SPIP Pemda
- 2) Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Merupakan kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan AD PPK Pusat.
- 3) Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Merupakan kegiatan pelaksanaan realisasi hasil rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk Monitoring, Operasi Tindak Lanjut (OTL) dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- 4) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Merupakan kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berupa :
- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi pada SKPD se Provinsi NTB
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi pada SKPD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Khusus
 - d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Kasus/Dumas
 - e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK
 - f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKP
 - g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri
 - h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Teknis lainnya
 - i. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
 - j. Rapat Gelar Pengawasan Daerah.
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan meliputi:

- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor dan P2UPD
- Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor dan P2UPD
- Bimbingan Teknik Substantif dan Pelatihan di Pusat
- Bimbingan Teknik Substantif dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
- Ekspose / Sosialisasi hasil Bimbingan Teknis Substantif.

Selain dari program dan kegiatan utama terdapat juga program/kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3. Indikator Sasaran

Adapun indikator sasaran Inspektorat Provinsi NTB dalam tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi NTB Dalam Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Kompeten.	3. Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor	28.33%
		4. Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat P2UPD	37.56%
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	3. Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%
		4. Opini BPK	WTP

3	Terwujudnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai.	3. Persentase SKPD yang menerapkan SPIP. 4. Tingkat Maturitas Pemda NTB	75.56% Peringkat 3
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang berkualitas.	5. Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. 6. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 7. Tingkat Kapabilitas APIP 8. Persentase Penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan	60% 80% Level 3 22.22%
5	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik.	3. Hasil Nilai PMPRB NTB 4. Persentase SKPD yang membangun WBK/WBBM/ZI	65 4.4%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3. Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata >60 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.	80% 65

Program Kegiatan Inspektorat Provinsi NTB tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.512.466.900,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.647.589.050,-
- Belanja Langsung : Rp. 12.864.877.850,-
- Total : Rp. 22.512.466.900,-

Tabel 3.2.

**Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan
dan Tingkat Capaian Tahun 2019**

No.	Sasaran Kinerja Program	Jumlah Kegiatan	Penetapan Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 keg	12 keg	4.419.897.000	1 Thn	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 keg	3 keg	364.441.000	1 Thn	100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 keg	2 keg	125.332.680	1 Thn	100%
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3keg	3 keg	130.451.200	1 Thn	100%
5.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 keg	1 keg	40.620.800	1 Thn	100%

6.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4 keg	4 keg	7.186.762.000	1 Thn	100%
7.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	2 keg	2 keg	385.000.000	1 Thn	100%
8.	Belanja Pegawai	14 Bln	14 Bln	9.647.589.050	14 bln	100%

BAB IV

PAGU INDIKATIF, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

<i>Inputs</i>	: APBD 2018Rp. 42.740.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah surat menyurat dinas 800 surat
<i>Outcomes</i>	: Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 80%
<i>Benefit</i>	: Meningkatnya Volume dan Kualitas Pelayanan
<i>Impact</i>	: Meningkatnya Pelayanan Publik

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

<i>Inputs</i>	: APBD 2018 Rp. 239.982.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah biaya tagihan air, listrik dan kebutuhan komunikasi selama 12 bulan
<i>Outcomes</i>	: Persentase pemenuhan kebutuhan air, listrik dan kebutuhan komunikasi 100%
<i>Benefit</i>	: Meningkatnya dukungan Tupoksi
<i>Impact</i>	: Meningkatkan Kualitas Kinerja dukungan pelaksanaan Tupoksi

3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

<i>Inputs</i>	: APBD 2018 Rp. 169.716.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah kendaraan operasional yang memadai 23 unit
<i>Outcomes</i>	: Persentase pemanfaatan kendaraan dinas/operasional 100%
<i>Benefit</i>	: Meningkatnya dukungan pelaksanaan Tupoksi
<i>Impact</i>	: Meningkatnya kualitas kerja

4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs : APBD 2018 Rp. 78.414.900,-

Outputs : Jumlah biaya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan

Outcomes : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP 100%

Benefit : Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Inputs : APBD 2018 Rp. 153.250.100,-

Outputs : Jumlah peralatan dan kebersihan kantor sebanyak 21 jenis

Outcomes : Persentase kantor bersih dan kondusif 80%

Benefit : Meningkatnya kenyamanan bekerja

Impact : Meningkatnya kualitas kerja

7) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Inputs : APBD 2018 Rp. 181.981.500,-

Outputs : Jumlah alat tulis kantor sebanyak 48 jenis

Outcomes : Persentase administrasi perkantoran 100%
Tingkat kapabilitas APIP level 3

Benefit : Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

8) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs : APBD 2018 Rp. 92.045.300,-

Outputs : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 jenis

Outcomes : Persentase administrasi perkantoran 100%
Tingkat Kapabilitas APIP level 3

Benefit : Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

- 9) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Inputs : APBD 2018 Rp. 14.609.400,-
Outputs : Jumlah komponen instalasi listrik dan alat penerangan sebanyak 14 jenis
Outcomes : Persentase kantor produktif dan aman 80%
Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 100%
Benefit : Meningkatnya kenyamanan bekerja
Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

- 10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Inputs : APBD 2018 Rp. 87.000.000,-
Outputs : Jumlah makan minum rapat dan tamu selama 12 bulan
Outcomes : Persentase makan minum rapat dan tamu 80%
Tingkat kapabilitas APIP level 3
Benefit : Meningkatnya kinerja pegawai
Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

- 11) Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Inputs : APBD 2018 Rp. 454.297.200,-
Outputs : Jumlah perjalanan dinas penyelarasan kegiatan pemerintah pusat dan daerah selama 12 bulan
Outcomes : Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%
Benefit : Terselarasnya kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif
Impact : Meningkatnya kuantitas kinerja

- 12) Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Inputs : APBD 2018 Rp. 151.820.000,-
Outputs : Jumlah perjalanan dinas penyelarasan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota selama 12 bulan

- Outcomes* : Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%
- Benefit* : Terselarasnya kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota lebih efektif
- Impact* : Meningkatnya kuantitas kinerja
- 13) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- Inputs* : APBD 2018 Rp. 2.754.040.000,-
- Outputs* : Jumlah tunjangan operasional pengawasan dan honorarium PTT selama 1 tahun
- Outcomes* : Persentase tenaga pengawas dan tenaga PTT yang memadai 100%
- Tingkat Kapabilitas APIP Level 3
- Benefit* : Terselenggaranya kelancaran tugas kedinasan
- Impact* : Meningkatnya kualitas kinerja
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Inputs* : APBD 2018 Rp. 142.076.000,-
- Outputs* : Jumlah perlengkapan gedung kantor sebanyak 12 jenis
- Outcomes* : Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor 80%
- Persentase SKPD yang menyusun SPIP 100%
- Benefit* : Meningkatnya kenyamanan bekerja
- Impact* : Meningkatkan kualitas kerja
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Inputs* : APBD 2018 Rp. 145.365.000,-
- Outputs* : Jumlah biaya jasa pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
- Outcomes* : Persentase kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja 80%
- Benefit* : Meningkatkan kenyamanan bekerja
- Impact* : Meningkatkan kualitas kerja

3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Inputs : APBD 2018 Rp. 77.000.000,-

Outputs : Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun

Outcomes : Persentase peralatan kantor terpelihara dengan baik 80%

Benefit : Meningkatkan motivasi kerja

Impact : Meningkatkan kualitas kerja

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

Inputs : APBD 2018 Rp. 28.490.000,-

Outputs : Jumlah kegiatan imtaq dan senam selama 1 tahun

Outcomes : Persentase pegawai mengikuti kegiatan Imtaq dan senam 80%

Benefit : Meningkatnya motivasi kerja

Impact : Terbentuk aparatur yang sehat jasmani dan rohani

2) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian

Inputs : APBD 2018 Rp. 96.842.680,-

Outputs : Jumlah honor Panitia Pelaksana Penilaian Angka Kredit untuk 4 kegiatan

Outcomes : Persentase pegawai menyusun Dupak dan SKP tepat waktu 90%
Tingkat kapabilitas APIP level 3

Benefit : Terwujudnya motivasi kerja

Impact : Meningkatnya kualitas kerja

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Inputs : APBD 2018 Rp. 23.985.500,-

Outputs : Jumlah honor tim penyusun laporan kinerja dan neraca tahunan selama 1 tahun

Outcomes : Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata >60 sebesar 100%
 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB 65
 Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%

Benefit : Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Impact : Terwujudnya kualitas kinerja SKPD

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Inputs : APBD 2018 Rp. 62.550.400,-

Outputs : Jumlah honor tim penyusun laporan keuangan tahunan selama 1 tahun

Outcomes : Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP 100%
 Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%
 Opini BPK WTP

Benefit : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan tahunan

Impact : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan per tahun

3) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja SKPD

Inputs : APBD 2018 Rp. 43.915.300,-

Outputs : Jumlah honor tim penyusun renja 2018

Outcomes : Tingkat kapabilitas APIP level 3
 Tingkat maturitas Pemda NTB Peringkat 3
 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB 70

Benefit : Terlaksana dan terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan 2018

Impact : Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2018

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang milik daerah

Inputs : APBD 2018 Rp.40.620.800,-

Outputs : Jumlah manajemen asset/barang milik daerah selama 12 bulan

Outcomes : Opini BPK WTP

Benefit : Meningkatnya pengelolaan asset/barang milik daerah secara efektif

Impact : Terwujudnya Pengelolaan asset/barang milik daerah yang baik

6. Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Inputs : APBD 2018 Rp. 2.765.269.100,-

Outputs : Jumlah biaya perjalanan dinas pengawasan selama 1 tahun

Outcomes : Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 80%

Tingkat Kapabilitas APIP level 3

Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%

Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 100%

Tingkat Maturitas Pemda NTB peringkat 3

Benefit : Menurunnya tingkat penyimpangan

Impact : Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih

- 2) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Inputs* : APBD 2018 Rp. 497.240.864
- Outputs* : Jumlah biaya kegiatan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi selama 1 tahun
- Outcomes* : Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 80%
- Tingkat Kapabilitas APIP level 3
- Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%
- Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 100%
- Tingkat Maturitas Pemda NTB peringkat 3
- Benefit* : Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan transparan
- Impact* : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel
- 3) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Inputs* : APBD 2018 Rp. 699.677.795
- Outputs* : Jumlah biaya perjalanan dinas tindak lanjut hasil pemeriksaan selama 1 tahun
- Outcomes* : Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan 60%
- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 80%
- Tingkat Kapabilitas APIP level 3
- Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%
- Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 100%
- Tingkat Maturitas Pemda NTB peringkat 3
- Benefit* : Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut
- Impact* : Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih

4) Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Inputs : APBD 2018 Rp. 3.224.574.241,-

Outputs : Jumlah biaya pelaksanaan kegiatan TP4D, Larwasda, Rakorwasda, TGR, dan EPPD

Outcomes : Hasil Nilai PMPRB NTB 60
Persentase SKPD yang membangun WBK/WBBM/ZI 8.9%

Tingkat Maturitas Pemda NTB peringkat 3

Tingkat Kapabilitas APIP level 3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB 70

Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata >60 sebanyak 100%

Benefit : Meningkatnya kualitas kegiatan evaluasi dan koordinasi pengawasan

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

1) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Inputs : APBD 2018 Rp. 308.674.000,-

Outputs : Jumlah biaya pelaksanaan Bimbingan Teknis

Outcomes : Persentase Aparatur Pengawas yang berseftifikat Auditor 38.33%

Persentase Aparatur Pengawas yang berseftifikat P2UPD 45%

Benefit : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan yang handal

Impact : Terwujudnya hasil kualitas kinerja dan pengawasan

- 2) Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas kinerja
- Inputs* : APBD 2018 Rp. 76.326.000.-
- Outputs* : Jumlah biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota untuk Pelatihan dan diklat
- Outcomes* : Persentase Aparatur Pengawas yang berseftifikat Auditor 38.33%
- Persentase Aparatur Pengawas yang berseftifikat P2UPD 45%
- Benefit* : Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM pengawasan
- Impact* : Terwujudnya kualitas hasil pengawasan

INSPEKTORAT PROV. NTB

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun (2014 - 2018).

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dimaksud, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan fokus pada aspek Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Mutu, dan Layanan Konsultasi.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2019, agar menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Inspektorat Provinsi NTB.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakaturh.

Mataram, Februari 2018

Inspektur Provinsi NTB,

IBNU SALIM, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681231 199403 1 070

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSPEKTORAT PROV. NTB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan. Penyusunan Renja Inspektorat selaku Perangkat Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah sesuai rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Substansi materi rancangan Renja Perangkat Daerah telah melalui proses pembahasan pada forum Perangkat Daerah mencakup :1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi;2) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3)Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan 4) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 adalah merupakan dokumen yang menjadi dasar Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan sesuai

tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB. Sedangkan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka dengan merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program yang dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

b. Tujuan

Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, sekaligus menjadi acuan dalam penentuan skala prioritas pencapaian Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah. Disamping itu, dokumen Renja digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi program kegiatan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN, secara umum menjelaskan gambaran keadaan Inspektorat Provinsi NTB, dengan penekanan pada aspek strategis Inspektorat serta permasalahan umum yang sedang dihadapi;

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI NTB TAHUN LALU, menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2017 serta Analisis Kinerja Pelayanan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB, menyajikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran serta Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi NTB;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN,

BAB V PENUTUP, menguraikan simpulan umum atas Renja Inspektorat serta langkah-langkah dimasa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017

Perubahan paradigma Manajemen Pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan UU 23 tahun 2014. Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Negara yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Terbitnya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*) dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mencapai Peraturan PerUndang-Undangan tersebut diatas, Inspektorat Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Provinsi NTB.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang Berintegritas, Profesional dan Kompeten.
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas.
3. Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai.
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang Berkualitas.
5. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Baik.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi NTB telah dikerahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tabel T-C.29 berikut ini gambaran dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB dan pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi NTB tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB, dapat diketahui dari uraian tabel T-C.29 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi NTB s/d Tahun 2018 sampai dengan Bulan Februari 2018 (Terlampir Tabel T-C.29).

Pada Renja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 terdapat total Anggaran yang telah terealisasi sebanyak Rp.870.348.691,-. Dengan Rincian sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.520.443.619,-
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.655.000,-
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp.6.390.000,-
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar Rp.0,-
- Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.3.200.000,-

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp.325.137.572,-
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp.14.522.500,-.

Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdapat 9 kegiatan PKPT. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Asistensi Laporan Keuangan
- Reviu Laporan Keuangan
- Reviu RKAP DAN RKA
- Pemeriksaan Reguler sesuai Kesepakatan bersama menjadi Pemeriksaan Kinerja Operasional
- Pemeriksaan Reguler Kab/Kota se NTB sesuai Permendagri disebut Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Evaluasi LAKIP Provinsi
- Evaluasi SPIP
- EPPD Evaluasi LAKIP Kab/Kota se NTB
- Reviu LAKIP

Sedangkan untuk Non PKPT terdapat 15 kegiatan sebagai berikut :

- Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
- Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKWBMM)
- Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/Kasus Pengaduan
- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
- Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- Tim Penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- Unit Gratifikasi
- Peningkatan Level APIP
- Maturity Pemda
- Pembinaan SKPD
- Penilaian SKPD

- Bimbingan Teknis
- Unit Layanan Pengaduan
- Unit Layanan Konsultasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi NTB

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi NTB, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK. Inspektorat Provinsi NTB harus dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal tersebut, akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan informasi tentang prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam **Tabel T-C.30 (Terlampir)**.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi NTB

Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik seiring dengan kecenderungan perubahan perbaikan budaya kerja birokrasi secara nasional. Prinsip *service oriented* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi. Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin pengelolaan administrasi dan keuangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat selama ini telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.

Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum dapat menghilangkan beberapa perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan intern pemerintah senantiasa dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi di Provinsi NTB secara terus menerus.

Kondisi pada Tahun 2017 total jumlah Rekomendasi sebanyak 17.595 dan telah ditindak lanjuti sebanyak 13.293 dan dalam proses sebanyak 6.307, sehingga masih terdapat 6.307 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan total nilai kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.52.112.996.689,11 yang berhasil ditarik sebesar

Rp.32.142.922.294,97 dan sisa yang belum bisa ditarik sebesar Rp.19.970.074.394,14. Keadaan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan relative kurang
- Pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahan belum maksimal
- Komitmen pimpinan unit kerja atas tindak lanjut hasil pemeriksaan masih kurang
- Belum ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh atasan langsung kepada pimpinan unit kerja yang tidak menindaklanjuti temuan
- Seringnya pergantian pejabat, PPK, PPTK, pengelola keuangan/pemegang kas, sehingga terjadi kesalahan berulang sebagai akibat minimnya pemahaman ketentuan perpajakan, tunjangan keluarga dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam pengelolaan keuangan.

Kondisi lainnya yang dapat digambarkan adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan mulai meningkat, sebagai akibat bergulirnya reformasi. Kepekaan masyarakat semakin tinggi, masyarakat semakin berani untuk melaporkan adanya dugaan praktek penyimpangan. Berdasarkan data Tahun 2017, Pengaduan yang masuk sebanyak 211 pengaduan. Baik Pengaduan pada UPP Saber Pungli NTB maupun Inspektorat Provinsi NTB, dari 211 pengaduan tersebut yang dapat ditangani sebanyak 23 pengaduan dengan OTT dan 24 Pengaduan dengan pemeriksaan serta klarifikasi. Hal ini karena keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi NTB sehingga tidak semua pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan penanganan khusus. Fungsi-fungsi pengawasan tersebut dilakukan secara pribadi dan juga disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terhadap hal tersebut Inspektorat Provinsi NTB memberikan respon yang positif dan menindak lanjuti setiap laporan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan, merupakan kecenderungan positif apabila ditinjau dari sisi peningkatan Pengawasan Masyarakat, disisi lain hal ini juga dapat menjadi tolok ukur terhadap efektifitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Reaksi ini terjadi antara lain karena adanya kemungkinan kelemahan-kelemahan dalam sistem atau prosedur pengawasan, serta kurang memadainya pengalokasian sumber daya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Visi Provinsi NTB terwujudnya masyarakat NTB yang BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING dan SEJAHTERA (Belum ada Visi Gubernur Terpilih)

Makna Visi

- **MASYARAKAT NTB**
SELURUH MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
- **BERIMAN**
TAAT BERAGAMA, BERBUDI PEKERTI LUHUR DAN TOLERAN
- **BERBUDAYA**
SADAR BUDAYA DAN MEMELIHARA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
- **BERDAYASAING**
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SERTA MASYARAKAT SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, INOVATIF, KREATIF
- **SEJAHTERA**
TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR (EKONOMI, SOSIAL DAN KEADILAN)

Visi Pemerintah Provinsi NTB “**Terwujudnya Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Sejahtera**” merupakan cita-cita seluruh lapisan birokrasi dan masyarakat Provinsi NTB. Visi tersebut hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menetapkan kondisi ideal yang diharapkan menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagi Inspektorat kiranya “Pemerintahan Daerah yang bersih” dan “Supremasi Hukum” merupakan kata kunci yang mengajak seluruh elemen dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar, Inspektorat akan menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendukung utama tercapainya visi Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintahan Daerah yang bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korup, kolusif dan nepotis. Pemerintahan bersih hanya dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum, akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber

daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang professional dengan berorientasi pada masa depan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah payung hukum yang menjadi dasar yang kuat dan menghilangkan keraguan dalam memberantas praktek penyimpangan tanpa pandang bulu. Peluang untuk melakukan kehendak Undang-Undang tersebut menjadi lebih besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan penyimpangan akan lebih maksimal dengan adanya prosedur yang ketat dan teratur. Untuk itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi faktor pendukung dalam memperbesar peluang Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 akan mengurangi masalah Kerugian Negara dan Kewajiban Penyetoran kepada negara yang disebabkan oleh kelalaian Pemegang Kas (Bendahara), karena Undang-Undang ini mewajibkan pengangkatan Bendahara dalam jabatan fungsional, sehingga akan terjadi peningkatan pemahaman para Bendahara terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Disamping peraturan per-Undang-Undangan yang dapat memberikan dukungan, ada pula Undang-Undang yang memberikan tantangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tantangan penerapan aturan ini akan dialami pada tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tetap berdampak positif terhadap kesempurnaan administrasi keuangan pemerintah.

Dengan memahami peluang dan tantangan tersebut maka kesiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan akan lebih mantap. Pada akhirnya pencapaian cita-cita tersebut dapat menunjukkan kecenderungan umum berupa :

- Menurunnya kasus yang merugikan Negara
- Meningkatnya Disiplin Kepegawaian, Administrasi, Anggaran dan Perpajakan

- Menurunnya pelanggaran terhadap Peraturan perUndang-Undangan dan Prosedur/Tata Kerja yang berlaku pada umumnya
- Membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam aspek pembiayaan, prosedur dan jangka waktu pelayanan.

Dalam perspektif yang lebih sempit, terkait dengan tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain :

- Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari PerUndang-Undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi.
- Meningkatnya persentasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan tepat waktu.
- Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah.
- Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat.
- Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi.
- Meningkatnya Level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah)
- Meningkatnya Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Pemda
- Meningkatnya Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Perangkat Daerah
- Meningkatnya Nilai EPPD (Evaluasi) pada Pemerintah Daerah
- Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi yang Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- Terwujudnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian LKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Perjanjian kerja Inspektorat Provinsi NTB dilakukan proses

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Provinsi NTB.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel T-C.31 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 pada satuan kerja Inspektorat Provinsi NTB dibawah ini.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Inspektorat Provinsi NTB

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa surat menyurat - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	42.740	Penyediaan jasa surat menyurat	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa surat menyurat - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	71.850	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	239.982	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	228.620	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Opini BPK	100%	169.716,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Se-NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Opini BPK	100%	183.614	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	78.414,9	Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	75.015	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. NTB	Persentase realisasi anggaran jasa kebersihan kantor	100%	172.824,5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. NTB	Persentase realisasi anggaran jasa kebersihan kantor	100%	194.000,6	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

			• Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100% Level 3				• Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100% Level 3		
	Penyediaan alat tulis kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran alat tulis kantor • Tingkat kapabilitas APIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100% Level 3	181.981,5	Penyediaan alat tulis kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran alat tulis kantor • Tingkat kapabilitas APIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100% Level 3	186.382,2	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa cetak dokumen, blanko, arsip, atau file penting lainnya • Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	92.045,3	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran jasa cetak dokumen, blanko, arsip, atau file penting lainnya • Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	133.523	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas	100% Level 3	14.609,4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas	100% Level 3	16.583	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

			SPIP Pemerintah Daerah					SPIP Pemerintah Daerah			
	Penyediaan makanan dan minuman	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran makanan dan minuman - Tingkat Kapabilitas APIP - Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100% Level 3 Level 3	87.000	Penyediaan makanan dan minuman	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran makanan dan minuman - Tingkat Kapabilitas APIP - Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100% Level 3 Level 3	135.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan daerah	Luar Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	100% 100%	454.297,2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik	100% 100%	377.049,6	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran - Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	454.297,2	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran - Tingkat Kapabilitas APIP	100% Level 3	191.200	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. NTB	Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran	100%	2.623.270,9	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Prov. NTB	Persentase realisasi anggaran jasa administrasi dan teknis perkantoran	100%	2.736.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

			• Persentase Penilaian SKPD yang sangat baik • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level 3				• Tingkat Kapabilitas APIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level 3		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur			
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran perlengkapan gedung kantor yang menunjang kegiatan kedinasan • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100%	142.076	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran perlengkapan gedung kantor yang menunjang kegiatan kedinasan • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100%	173.056	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100%	145.365	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov. NTB	• Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100%	215.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	77.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%	50.000	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Kompetensi Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Kompetensi Aparatur			
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pembinaan mental dan fisik aparatur - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP - Matruritas SPIP	100%	28.490	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pembinaan mental dan fisik aparatur - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP - Matruritas SPIP	100%	40.900	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kepegawaian - Tingkat Kapabilitas APIP	100%	96.842,68	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian - Tingkat Kapabilitas APIP	100%	98.038,8	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB	100%	28.305	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB	100%	28.305	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP - Opini BPK	100%	72.342	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP - Opini BPK	100%	73.364	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Persentase kategori hasil	100%	53.059	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Persentase kategori hasil	100%	53.123	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

			evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60					evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60			
5	Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah					Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah					
	Peningkatan Manajemen asset/barang milik daerah	Prov. NTB	- Persentase hasil pelaksanaan manajemen asset/barang milik daerah - Opini BPK	100% WTP	40.620,8	Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Prov. NTB	- Persentase hasil pelaksanaan manajemen asset/barang milik daerah - Opini BPK	100% WTP	36.928	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Se-NTB	- Jumlah pelaksanaan hasil pemeriksaan sesuai dengan jumlah obyek yang diperiksa - Persentase Penilaian SKPD yang Memuaskan	12 Kali 100%	2.912.581,6	Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Se-NTB	- Jumlah pelaksanaan hasil pemeriksaan sesuai dengan jumlah obyek yang diperiksa - Persentase Penilaian SKPD yang Memuaskan	12 Kali 100%	2.335.183,423	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Se-NTB	- Jumlah pelaksanaan AD PPK - Persentase Penilaian SKPD yang	1 tahun 100%	497.240,864	Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Se-NTB	- Jumlah pelaksanaan AD PPK - Persentase Penilaian SKPD yang	1 tahun 100%	422.803,877	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

			sangat baik					sangat baik			
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Se-NTB	- Persentase tindak lanjut atas temuan Pengawasan - Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	100%	699.677,795	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Se-NTB	- Persentase tindak lanjut atas temuan Pengawasan - Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	100%	659.621	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Hasil Nilai PMPRB NTB - Jumlah SKPD yang membangun WBK/WBB M - Tingkat Maturitas Pemda - Tingkat Kapabilitas APIP - Satgas Saber Pungli	100% B 4 SPIP Level 3 100%	3.036.296,191	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Prov. NTB	- Persentase realisasi anggaran Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Hasil Nilai PMPRB NTB - Jumlah SKPD yang membangun WBK/WBB M - Tingkat Maturitas Pemda - Tingkat Kapabilitas APIP - Satgas Saber Pungli	100% B 4 SPIP Level 3 100%	2.641.312,5	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Luar dan Dalam Prov. NTB	• Persentase tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat jabatan Fungsional auditor • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat P2UPD • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor Kepegawaian	1 tahun 100% 100%	308.674	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Luar dan Dalam Prov. NTB	• Persentase tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat jabatan Fungsional auditor • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat P2UPD • Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat Auditor Kepegawaian	1 tahun 100% 100%	233.822	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018
Kegiatan Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Se-NTB	• Kualitas kinerja APIP Inspektorat • Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60 • Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi NTB	60 orang 100% 100%	76.326	Kegiatan Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Se-NTB	• Kualitas kinerja APIP Inspektorat • Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata 60 • Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi TB	60 orang 100% 100%	62.529	Kebutuhan dana sesuai dengan DPA 2018

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk Inspektorat Provinsi NTB melalui usulan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi yang ada di unit kerja Inspektorat Provinsi NTB dan kebijakan Daerah/Nasional di bidang Pembinaan dan Pengawasan. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi NTB, maupun ditingkat Nasional. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat Provinsi NTB untuk melaksanakan program prioritas mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan lebih meningkatkan program kegiatan terutama pembinaan, asistensi, pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional diupayakan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB.

Untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi NTB tahun 2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Sejahtera”, maka usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2014-2018 sebagaimana yang tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan tahun 2014-2018.

Dalam perspektif inilah, Inspektorat Provinsi NTB memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB, sekaligus terwujudnya “pemerintahan daerah yang bersih” dan “supremasi hukum”.

Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih merupakan wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang terhindar dari praktek korupsi, kolusif dan nepotism melalui penegakkan hukum. Pengembangan pola transparansi dan partisipasi publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang professional dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja

Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 adalah terwujudnya pelaksanaan dan pengawasan internal di Perangkat Daerah Provinsi serta Pembinaan dan Pengawasan di Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Sasaran Renja tertuang dalam Program Kegiatan Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2018 **mengacu** pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi NTB yang sejalan dengan RPJMD Provinsi NTB 2014 – 2018.

Program dan kegiatan Strategis Inspektorat Provinsi NTB 2014 – 2018 (khusus pada tahun 2018) adalah program 5 dan 6 dari 7 program yang ditetapkan ;

5. Program Peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, meliputi :

1) Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala ini adalah merupakan penjabaran dari tugas pokok dari Inspektorat Provinsi NTB selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi NTB. Pada tahun 2018 Pengawasan direncanakan dengan berbasis resiko menggunakan 8 indikator untuk menentukan Perangkat Daerah yang paling berisiko. Delapan indikator tersebut antara lain:

- Anggaran belanja keseluruhan
- Waktu terakhir diaudit
- Jumlah temuan tahun lalu
- Jumlah program dan kegiatan
- Anggaran pendapatan
- Jumlah SDM
- Persentase Tindak Lanjut Temuan
- Evaluasi SAKIP

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan **Reguler** Berbasis Risiko (Dinas, Badan, Biro, PU, Kantor Penghubung, Dana Desa, Dana BOS, Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa)
- b. Asistensi Laporan Keuangan
- c. Reviu Laporan Keuangan
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- e. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)
- f. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- g. Reviu Rencana Strategis (Renstra)
- h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se Provinsi NTB ataupun Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
- i. Evaluasi Sistem Pengendalian Insternal Pemerintah (SPIP)
- j. Evaluasi Pengarusutamaan Gender Perangkat Daerah

- k. Pembagian dan Evaluasi Zona Integritas
 - l. Pengembangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM)
 - m. Penegakkan Integritas
 - n. Pencegahan Saber Pungli
 - o. Penilaian Perangkat Daerah
 - p. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - q. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - r. Maturitas SPIP Pemda
- 2) Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
- Merupakan kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan AD PPK Pusat.
- 3) Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
- Merupakan kegiatan pelaksanaan realisasi hasil rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk Monitoring, Operasi Tindak Lanjut (OTL) dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- 4) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Merupakan kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berupa :
- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi pada Perangkat Daerah se Provinsi NTB
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Khusus
 - d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Kasus/Dumas
 - e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK
 - f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKP
 - g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri
 - h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Teknis lainnya
 - i. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
 - j. Rapat Gelar Pengawasan Daerah.

6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan meliputi:

- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor dan P2UPD
- Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor dan P2UPD
- Bimbingan Teknik Substantif dan Pelatihan di Pusat
- Bimbingan Teknik Substantif dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
- Ekspose / Sosialisasi hasil Bimbingan Teknis Substantif.

Selain dari program dan kegiatan utama terdapat juga program/kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3. Program dan kegiatan

Program Kegiatan Inspektorat Provinsi NTB tahun 2019 direncanakan anggaran sebesar Rp. 22.781.438.300,- sesuai **tabel T-C.33 (terlampir)** terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | : Rp. 9.702.638.500,- |
| - Belanja Langsung | : Rp. 13.078.799.800,- |

Total	: Rp. 22.781.438.300,-
-------	------------------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 79.035.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah surat menyurat dinas 800 surat
<i>Outcomes</i>	: Persentase ketersediaan kelengkapan administrasi Perkantoran
<i>Benefit</i>	: Meningkatnya Volume dan Kualitas Pelayanan
<i>Impact</i>	: Meningkatnya Pelayanan Publik

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 250.402.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah tagihan air, listrik dan kebutuhan komunikasi selama 12 bulan
<i>Outcomes</i>	: Persentase pemenuhan kebutuhan air, listrik dan kebutuhan komunikasi 100%
<i>Benefit</i>	: Tingkat dukungan Tupoksi
<i>Impact</i>	: Tingkat Kualitas Kinerja dukungan pelaksanaan Tupoksi

3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 183.614.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah kendaraan operasional yang memadai 23 unit
<i>Outcomes</i>	: Persentase pemanfaatan kendaraan dinas/operasional 100%
<i>Benefit</i>	: Tingkat dukungan pelaksanaan Tupoksi
<i>Impact</i>	: Tingkat kualitas kerja

4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs : APBD 2019 Rp. 76.175.800,-

Outputs : Jumlah honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan

Outcomes : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP 100%

Benefit : Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Inputs : APBD 2019 Rp. 194.095.100,-

Outputs : Jumlah peralatan dan kebersihan kantor sebanyak 21 jenis

Outcomes : Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur

Benefit : Meningkatnya kenyamanan bekerja

Impact : Meningkatnya kualitas kerja

7) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Inputs : APBD 2019 Rp. 195.726.700,-

Outputs : Jumlah alat tulis kantor sebanyak 48 jenis

Outcomes : Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor Tingkat kapabilitas APIP level 3

Benefit : Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

8) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs : APBD 2019 Rp. 145.995.500,-

Outputs : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 jenis

Outcomes : Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Benefit : Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

9) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Inputs : APBD 2019 Rp. 16.583.000,-
Outputs : Jumlah komponen instalasi listrik dan alat penerangan sebanyak 14 jenis
Outcomes : Persentase Ketersediaan Kelengkapan Alat Perkantoran
Benefit : Meningkatnya kenyamanan bekerja
Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Inputs : APBD 2019 Rp. 150.000.000,-
Outputs : Jumlah makan minum rapat dan tamu selama 12 bulan
Outcomes : Persentase Ketersediaan makanan dan minuman
Benefit : Meningkatnya kinerja pegawai
Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

11) Kegiatan Rapat – Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Inputs : APBD 2019 Rp. 459.000.000,-
Outputs : Jumlah perjalanan dinas penyelarasan kegiatan pemerintah pusat dan daerah selama 12 bulan
Outcomes : Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Benefit : Keselarasan kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik
Impact : Meningkatnya kuantitas kinerja

12) Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Inputs : APBD 2019 Rp. 242.461.200,-

Outputs : Jumlah perjalanan dinas penyelarasan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota selama 12 bulan

Outcomes : Persentase penilaian Prestasi Kinerja SKPD yang memuaskan 33.33%

Benefit : Keselarasn kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota lebih baik

Impact : Meningkatnya kuantitas kinerja

13) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah

Inputs : APBD 2019 Rp. 2.736.000.000,-

Outputs : Jumlah tunjangan operasional pengawasan dan honorarium PTT selama 1 tahun

Outcomes : Persentase tenaga pengawas dan tenaga PTT yang memadai 100%

Tingkat Kapabilitas APIP Level 3

Benefit : Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan yang efektif

Impact : Meningkatnya kualitas kinerja

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Inputs : APBD 2019 Rp. 119.381.000,-

Outputs : Jumlah perlengkapan gedung kantor sebanyak 12 jenis

Outcomes : Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor 80%

Benefit : Meningkatnya kenyamanan bekerja

Impact : Meningkatkan kualitas kerja

- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Inputs* : APBD 2019 Rp. 215.000.000,-
 - Outputs* : Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
 - Outcomes* : Persentase kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja 80%
 - Benefit* : Meningkatkan kenyamanan bekerja
 - Impact* : Meningkatkan kualitas kerja
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - Inputs* : APBD 2019 Rp. 61.000.000,-
 - Outputs* : Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun
 - Outcomes* : Persentase peralatan kantor terpelihara dengan baik 80%
 - Benefit* : Meningkatkan motivasi kerja
 - Impact* : Meningkatkan kualitas kerja
3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1) Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur
 - Inputs* : APBD 2019 Rp. 40.900.000,-
 - Outputs* : Jumlah kegiatan imtaq dan senam selama 1 tahun
 - Outcomes* : Persentase pegawai mengikuti kegiatan Imtaq dan senam 80%
 - Benefit* : Meningkatnya motivasi kerja
 - Impact* : Terbentuk aparatur yang sehat jasmani dan rohani
 - 2) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
 - Inputs* : APBD 2019 Rp. 103.300.000,-
 - Outputs* : Jumlah honor Panitia Pelaksana Penilaian Angka Kredit untuk 4 kegiatan
 - Outcomes* : Persentase pegawai menyusun Dupak dan SKP tepat waktu 90%
 - Benefit* : Terwujudnya motivasi kerja
 - Impact* : Meningkatnya kualitas kerja

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 88.645.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah honor tim penyusun laporan kinerja dan neraca tahunan selama 1 tahun
<i>Outcomes</i>	: Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi NTB
<i>Benefit</i>	: Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
<i>Impact</i>	: Terwujudnya kualitas kinerja SKPD

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 73.920.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah honor tim penyusun laporan keuangan tahunan selama 1 tahun
<i>Outcomes</i>	: Opini BPK (WTP)
<i>Benefit</i>	: Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan tahunan
<i>Impact</i>	: Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan per tahun

3) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 53.148.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah honor tim penyusun renja 2018
<i>Outcomes</i>	: Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat (A)
<i>Benefit</i>	: Terlaksana dan terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan 2018
<i>Impact</i>	: Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2018

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang milik daerah

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 36.928.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Dokumen Laporan Asset/Barang Inspektorat Provinsi NTB
<i>Outcomes</i>	: Opini BPK WTP
<i>Benefit</i>	: Meningkatnya pengelolaan asset/barang milik daerah secara efektif

Impact : Terwujudnya Pengelolaan asset/barang milik daerah

6. Program Peningkatan Profesionalisme APIP

1) Pelatihan Pengembangan APIP

Inputs : APBD 2019 Rp. 240.740.000,-

Outputs : Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat

Outcomes : Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bersertifikat Auditor dan P2UPD

Benefit : Pemenuhan Formasi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Inputs : APBD 2019 Rp. 49.330.000,-

Outputs : Jumlah Kegiatan Bimtek

Outcomes : Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bersertifikat Auditor dan P2UPD

Benefit : Pemenuhan Formasi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

7. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

1) Evaluasi LPPD Kab/Kota

Inputs : APBD 2019 Rp. 189.435.600,-

Outputs : Jumlah Kegiatan

Outcomes : Peringkat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Benefit : Peningkatan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (sangat tinggi)

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Pemeriksaan Kinerja SKPD

Inputs : APBD 2019 Rp. 32.815.600,-

Outputs : Jumlah Kegiatan

Outcomes : Peringkat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

<i>Benefit</i>	: Peningkatan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (sangat tinggi)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1) Review Lakip Pemda

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 25.045.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Evaluasi Lakip PD

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 126.765.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Fasilitasi Kegiatan RB

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 18.275.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4) Pembangunan Zona Integritas pada PD

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 18.245.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

5) Penilaian PD

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 22.880.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

6) Review RPJMD

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 24.592.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

7) Review Renstra

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 25.045.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

8) Review Renja

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 24.945.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

9) Review RKPD

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 25.075.000,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

10) Review KUA PPAS

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 24.945.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

11) Review RKA

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 25.045.300,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
<i>Benefit</i>	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

9. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN

1) Penanganan Pengaduan Masyarakat

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 303.655.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti
<i>Outcomes</i>	: Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
<i>Benefit</i>	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 303.175.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan Tertentu
<i>Outcomes</i>	: Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
<i>Benefit</i>	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 429.789.500,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
<i>Benefit</i>	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik

- Impact* : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- 4) Kegiatan Saber Pungli
- Inputs* : APBD 2019 Rp. 900.652.500,-
- Outputs* : Jumlah Kegiatan
- Outcomes* : Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- Benefit* : Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
- Impact* : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- 5) Unit Gratifikasi
- Inputs* : APBD 2019 Rp. 18.411.900,-
- Outputs* : Jumlah Kegiatan
- Outcomes* : Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- Benefit* : Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
- Impact* : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan TP4D
- Inputs* : APBD 2019 Rp. 1.152.187.500,-
- Outputs* : Jumlah Kegiatan Pendampingan TP4D
- Outcomes* : Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- Benefit* : Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
- Impact* : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
10. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan
- 1) Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- Inputs* : APBD 2019 Rp. 75.798.000,-
- Outputs* : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi
- Outcomes* : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Benefit* : Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
- Impact* : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- 2) Reviu Atas Laporan Keuangan
- Inputs* : APBD 2019 Rp. 26.818.000,-
- Outputs* : Jumlah Kegiatan
- Outcomes* : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Benefit : Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Pemeriksaan Reguler / Audit Kinerja (Audit Operasional)

Inputs : APBD 2019 Rp. 1.571.355.300,-

Outputs : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler/audit kinerja (Audit Operasional)

Outcomes : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Benefit : Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

11. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1) Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)

Inputs : APBD 2019 Rp. 26.795.300,-

Outputs : Jumlah Kegiatan

Outcomes : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Benefit : Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Inputs : APBD 2019 Rp. 709.100.000,-

Outputs : Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan

Outcomes : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Benefit : Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Kegiatan TPTGR

Inputs : APBD 2019 Rp. 621.397.600,-

Outputs : Jumlah Kegiatan

<i>Outcomes</i>	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
<i>Benefit</i>	: Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4) Kegiatan Sidang Majelis TPTGR

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 307.516.200,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan
<i>Outcomes</i>	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
<i>Benefit</i>	: Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

12. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB

1) Pendampingan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 58.327.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan
<i>Outcomes</i>	: Level Maturitas SPIP Pemda
<i>Benefit</i>	: Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 58.215.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP
<i>Outcomes</i>	: Level Maturitas SPIP Pemda
<i>Benefit</i>	: Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Evaluasi PUG

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 49.275.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG
<i>Outcomes</i>	: Level Maturitas SPIP Pemda
<i>Benefit</i>	: Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

13. Program Peningkatan Kapabilitas APIP

1) Telahaan Sejawat

<i>Inputs</i>	: APBD 2019 Rp. 71.835.600,-
<i>Outputs</i>	: Jumlah Kegiatan Telaah Sejawat
<i>Outcomes</i>	: Level Kapabilitas APIP
<i>Benefit</i>	: Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
<i>Impact</i>	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun (2014 - 2018) dan Renstra baru (2019 – 2023).

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dimaksud, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada aspek Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Mutu, dan Layanan Konsultasi.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2019, agar menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Inspektorat Provinsi NTB.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakaturh.

Mataram, 2018

INSPEKTUR PROVINSI NTB

IBNU SALIM, SH., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19681231 199403 1 070

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSPEKTORAT PROV. NTB

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Inputs	: APBD 2019 Rp. 79.035.000,-
Outputs	: Jumlah surat menyurat dinas 800 surat
Outcomes	: Terwujudnya Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang Memadai
Benefit	: Meningkatnya Volume dan Kualitas Pelayanan
Impact	: Meningkatnya Pelayanan Publik

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Inputs	: APBD 2019 Rp. 250.402.000,-
Outputs	: Jumlah tagihan air, listrik dan kebutuhan komunikasi selama 12 bulan
Outcomes	: Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Air, Listrik dan Sarana Komunikasi
Benefit	: Meningkatnya dukungan Tupoksi
Impact	: Meningkatnya Kualitas Kinerja dukungan pelaksanaan Tupoksi

3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Inputs	: APBD 2019 Rp. 183.614.000,-
Outputs	: Jumlah kendaraan operasional yang memadai 23 unit
Outcomes	: Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai
Benefit	: Meningkatnya sarana pendukung pelaksanaan Tupoksi
Impact	: Meningkatnya kualitas kerja

4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs	: APBD 2019 Rp. 76.175.800,-
Outputs	: Jumlah honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan
Outcomes	: Tersedianya Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP
Benefit	: Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
Impact	: Meningkatnya kualitas kinerja

5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Inputs	: APBD 2019 Rp. 194.095.100,-
Outputs	: Jumlah peralatan dan kebersihan kantor sebanyak 21 jenis
Outcomes	: Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai
Benefit	: Meningkatnya kenyamanan bekerja
Impact	: Meningkatnya kualitas kerja

6) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Inputs	: APBD 2019 Rp. 195.726.700,-
Outputs	: Jumlah alat tulis kantor sebanyak 48 jenis
Outcomes	: Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai
Benefit	: Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Impact	: Meningkatnya kualitas kerja

7) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs	: APBD 2019 Rp. 145.995.500,-
Outputs	: Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 jenis
Outcomes	: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
Benefit	: Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Impact	: Meningkatnya kualitas kerja

8) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Inputs	: APBD 2019 Rp. 16.583.000,-
Outputs	: Jumlah komponen instalasi listrik dan alat penerangan sebanyak 14 jenis
Outcomes	: Tersedianya Kelengkapan Alat Perkantoran yang memadai
Benefit	: Meningkatnya kenyamanan bekerja
Impact	: Meningkatnya kualitas kinerja

9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Inputs	: APBD 2019 Rp. 150.000.000,-
Outputs	: Jumlah makan minum rapat dan tamu selama 12 bulan
Outcomes	: Tersedianya makanan dan minuman yang memadai
Benefit	: Meningkatnya koordinasi kerja pegawai
Impact	: Meningkatnya kualitas kinerja

10) Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Inputs	: APBD 2019 Rp. 459.000.000,-
Outputs	: Jumlah perjalanan dinas penyelarasan kegiatan pemerintah pusat dan daerah selama 12 bulan
Outcomes	: Terwujudnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi sesuai Kebutuhan
Benefit	: Keselarasan kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik
Impact	: Terwujudnya Pelaksanaan Program – Program Pusat dan Daerah

11) Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Inputs	: APBD 2019 Rp. 242.461.200,-
Outputs	: Jumlah perjalanan dinas penyelarasan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota selama 12 bulan

Outcomes	: Terwujudnya Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang Selaras
Benefit	: Keselarasan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota lebih baik
Impact	: Meningkatnya kinerja Provinsi dan Kabupaten

12) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah

Inputs	: APBD 2019 Rp. 2.736.000.000,-
Outputs	: Jumlah tunjangan operasional pengawasan dan honorarium PTT selama 1 tahun
Outcomes	: Tersedianya tenaga pengawas dan tenaga PTT yang memadai Meningkatnya Kapabilitas APIP
Benefit	: Terwujudnya kelancaran tugas pengawasan dan kedinasan yang efektif
Impact	: Meningkatnya kualitas kinerja

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Inputs	: APBD 2019 Rp. 119.381.000,-
Outputs	: Jumlah perlengkapan gedung kantor sebanyak 12 jenis
Outcomes	: Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
Benefit	: Meningkatnya kenyamanan bekerja
Impact	: Meningkatkan kualitas kerja

2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Inputs	: APBD 2019 Rp. 215.000.000,-
Outputs	: Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
Outcomes	: Tersedianya gedung kantor yang terpelihara dengan baik
Benefit	: Meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja
Impact	: Meningkatkan kualitas kerja

3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Inputs	: APBD 2019 Rp. 61.000.000,-
Outputs	: Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun
Outcomes	: Tersedianya peralatan kantor yang terpelihara dengan baik
Benefit	: Meningkatkan kelancaran kerja
Impact	: Meningkatkan kualitas kerja

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

Inputs	: APBD 2019 Rp. 40.900.000,-
Outputs	: Jumlah kegiatan imtaq dan senam selama 1 tahun
Outcomes	: Terwujudnya peningkatan mental dan fisik Aparatur
Benefit	: Meningkatnya motivasi kerja
Impact	: Terbentuk aparatur yang sehat jasmani dan rohani

2) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian

Inputs	: APBD 2019 Rp. 103.300.000,-
Outputs	: Jumlah honor Panitia Pelaksana Penilaian Angka Kredit untuk 4 kegiatan
Outcomes	: Terwujudnya penyusunan Dupak dan SKP tepat waktu
Benefit	: Terwujudnya pengukuran kinerja
Impact	: Meningkatnya kualitas kinerja

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Inputs	: APBD 2019 Rp. 88.645.000,-
Outputs	: Jumlah honor tim penyusun laporan kinerja tahunan selama 1 tahun
Outcomes	: Tersedianya laporan kinerja yang berkualitas
Benefit	: Meningkatkan nilai evaluasi SAKIP

- Impact : Terwujudnya kualitas kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Inputs : APBD 2019 Rp. 73.920.000,-
- Outputs : Jumlah honor tim penyusun laporan keuangan tahunan selama 1 tahun
- Outcomes : Terwujudnya penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
- Benefit : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan tahunan
- Impact : Opini BPK WTP
- 3) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Inputs : APBD 2019 Rp. 53.148.000,-
- Outputs : Jumlah honor tim penyusun renja 2018
- Outcomes : Tersedianya Renja yang selaras dengan RKPD
- Benefit : Terlaksana dan terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan 2018
- Impact : Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2018
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
- Inputs : APBD 2019 Rp. 36.928.000,-
- Outputs : Jumlah Dokumen Laporan Asset/Barang Inspektorat Provinsi NTB
- Outcomes : Tersedianya laporan aset yang valid
- Benefit : Meningkatnya pengelolaan asset/barang milik daerah secara efektif
- Impact : Meningkatnya keamanan Barang Milik Daerah
6. Program Peningkatan Profesionalisme APIP
- 1) Pelatihan Pengembangan APIP
- Inputs : APBD 2019 Rp. 240.740.000,-
- Outputs : Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat
- Outcomes : Tersedianya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bersertifikat Auditor dan P2UPD

Benefit : Pemenuhan Formasi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Inputs : APBD 2019 Rp. 49.330.000,-

Outputs : Jumlah Kegiatan Bimtek

Outcomes : Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bersertifikat teknis substantif

Benefit : Pemenuhan Formasi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

7. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

1) Evaluasi LPPD Kab/Kota

Inputs : APBD 2019 Rp. 189.435.600,-

Outputs : Jumlah Kabupaten / Kota

Outcomes : Meningkatnya Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Benefit : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota)

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Pemeriksaan Kinerja SKPD

Inputs : APBD 2019 Rp. 32.815.600,-

Outputs : Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kinerja

Outcomes : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Benefit : Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1) Review LKjIP Pemda

Inputs : APBD 2019 Rp. 25.045.300,-

Outputs : Jumlah Kegiatan Reviu LKjIP

Outcomes	: Tersedianya laporan kinerja yang akurat, handal dan vaild
Benefit	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Evaluasi Lakip PD

Inputs	: APBD 2019 Rp. 126.765.300,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP
Outcomes	: Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Benefit	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Fasilitasi Kegiatan RB

Inputs	: APBD 2019 Rp. 18.275.600,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan RB
Outcomes	: Terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan efisien
Benefit	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Impact	: Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4) Pembangunan Zona Integritas pada PD

Inputs	: APBD 2019 Rp. 18.245.300,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona
Outcomes	: Meningkatnya Kapabilitas Akuntabilitas Kinerja Pemda
Benefit	: Terwujudnya WBK dan WBBM
Impact	: Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

5) Penilaian PD

Inputs	: APBD 2019 Rp. 22.880.300,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian

Outcomes	: Meningkatnya prestasi kerja Perangkat Daerah
Benefit	: Terwujudnya Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi
Impact	: Meningkatnya kinerja pelayanan publik

6) Review RPJMD

Inputs	: APBD 2019 Rp. 24.592.300,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan Reviu
Outcomes	: Tersedianya RPJMD yang berkualitas
Benefit	: Meningkatnya kualitas perencanaan Pemda
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

7) Review Renstra

Inputs	: APBD 2019 Rp. 25.045.300,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan Reviu
Outcomes	: Tersedianya dokumen Renstra yang selaras dan berkualitas
Benefit	: Nilai SAKIP Pemda (A)
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

8) Review Renja

Inputs	: APBD 2019 Rp. 24.945.300,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Tersedianya dokumen Renja yang selaras dan berkualitas
Benefit	: Nilai SAKIP Pemda (A)
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

9) Review RKPD

Inputs	: APBD 2019 Rp. 25.075.000,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Tersedianya Dokuman RKPD yang selaras dengan RPJMD
Benefit	: Nilai SAKIP Pemda (A)
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

10) Review KUA PPAS

Inputs	: APBD 2019 Rp. 24.945.300,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda
Benefit	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

11) Review RKA

Inputs	: APBD 2019 Rp. 25.045.300,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Tersedianya dokumen RKA yang selaras dan sesuai ketentuan
Benefit	: Peningkatan Nilai SAKIP Pemda (A)
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

9. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN

1) Penangan Pengaduan Masyarakat

Inputs	: APBD 2019 Rp. 303.655.600,-
Outputs	: Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti
Outcomes	: Meningkatnya tindaklanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Benefit	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik meningkat
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus

Inputs	: APBD 2019 Rp. 303.175.600,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan Tertentu
Outcomes	: Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat
Benefit	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih
Impact	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik

3) Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN

Inputs	: APBD 2019 Rp. 429.789.500,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan

Outcomes	: Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN
Benefit	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
Impact	: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik

4) Kegiatan Saber Pungli

Inputs	: APBD 2019 Rp. 900.652.500,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi
Benefit	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Impact	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik

5) Unit Gratifikasi

Inputs	: APBD 2019 Rp. 18.411.900,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Menurunnya tingkat gratifikasi
Benefit	: Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Impact	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik

6) Kegiatan TP4D

Inputs	: APBD 2019 Rp. 1.152.187.500,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan Pendampingan TP4D
Outcomes	: Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Benefit	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Impact	: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik

10. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan

1) Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Inputs	: APBD 2019 Rp. 75.798.000,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi
Outcomes	: Tersedianya Laporan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
Benefit	: Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Impact : Opini Laporan Keuangan Pemda

2) Reviu Atas Laporan Keuangan

Inputs : APBD 2019 Rp. 26.818.000,-

Outputs : Jumlah Kegiatan

Outcomes : Laporan Keuangan yang sesuai SAP

Benefit : Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Impact : Opini Laporan Keuangan Pemda

3) Pemeriksaan Reguler / Audit Kinerja (Audit Operasional)

Inputs : APBD 2019 Rp. 1.571.355.300,-

Outputs : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler/audit kinerja (Audit Operasional)

Outcomes : Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku

Benefit : Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

11. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1) Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)

Inputs : APBD 2019 Rp. 26.795.300,-

Outputs : Jumlah Kegiatan

Outcomes : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Benefit : Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Inputs : APBD 2019 Rp. 709.100.000,-

Outputs : Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan

Outcomes : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Benefit : Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Impact : Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Kegiatan TPTGR

Inputs	: APBD 2019 Rp. 621.397.600,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut kerugian Daerah
Benefit	: Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4) Kegiatan Sidang Majelis TPTGR

Inputs	: APBD 2019 Rp. 307.516.200,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan
Outcomes	: Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut kerugian Daerah
Benefit	: Menurunnya nilai Kerugian Daerah
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

12. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB

1) Pendampingan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Inputs	: APBD 2019 Rp. 58.327.600,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan
Outcomes	: Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemda
Benefit	: Menurunnya tingkat temuan pemeriksaan
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Inputs	: APBD 2019 Rp. 58.215.600,-
Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP
Outcomes	: Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemda
Benefit	: Meningkatnya pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3) Evaluasi PUG

Inputs	: APBD 2019 Rp. 49.275.600,-
--------	------------------------------

Outputs	: Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG
Outcomes	: Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemda
Benefit	: Menurunnya temuan gratifikasi
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

13. Program Peningkatan Kapabilitas APIP

1) Telahaan Sejawat

Inputs	: APBD 2019 Rp. 71.835.600,-
Outputs	: Jumlah Kegiatan Telaah Sejawat
Outcomes	: Meningkatnya Level Kapabilitas APIP
Benefit	: Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan
Impact	: Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Lampiran 1

**PETA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
DAN INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2018**

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				KETERANGAN		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4															
ASISTEN I																																																				
1.	INSPEKTORAT				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							1	Asistensi LK				
2.	DPRD				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							2	Reviu LK				
3.	DINAS TRANSMIGRASI				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							3	Reviu RKAP dan RKA				
4.	KESBANGPOLDAGRI				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							4	Pemeriksaan Reguler				
5.	BPM				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							5	Pemeriksaan Reguler P. Lombok				
6.	BKD				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							6	Pemeriksaan Reguler P. Sumbawa				
7.	POLISI PAMONG PRAJA				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							7	Evaluasi LAKIP Provinsi				
8.	KANTOR PENGHUBUNG				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							8	Evaluasi SPIP				
9.	BIRO PEMERINTAHAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							9	EPPD				
10.	BIRO HUKUM				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							10	EPPD				
11.	BIRO ORGANISASI				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3							11	Evaluasi LAKIP P. Lombok				
ASISTEN II																																																				
12.	KPID				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								12	Evaluasi LAKIP P. Sumbawa			
13.	BIRO EKONOMI				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								13	Evaluasi PUG			
14.	BIRO AP				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								14	Reviu LAKIP			
15.	DINAS PERHUBUNGAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								15	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa			
16.	DINAS PARIWISATA				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								16	Kemen. Kesehatan			
17.	DINAS PU				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								17	Kemen. Dikbud			
18.	DINAS PERUMAHAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								18	Kemen. Ketenagakerjaan			
19.	DISKOP-UKM				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								19	Kemen. Desa, PDT, dan Transmigrasi			
20.	DINAS PEINDUSTRIAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								20	Kemen. Koperasi dan UKM			
21.	DINAS PERDAGANGAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								21	Kemen. Dalam Negeri			
22.	DINAS PERTANIAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								22	Kemen. Pora			
23.	DINAS PETERNAKAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3								23	Kemen. Perdagangan			
24.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
25.	DINAS KEHUTANAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
26.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
27.	BAPPEDA				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
28.	BADAN KETAHANAN PANGAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
29.	BPMPT				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
ASISTEN III																																																				
30.	BIRO KESRA				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
31.	BIRO UMUM				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
32.	BPKAD				15			1	1			2	2	4	4	4	4									3								7	7					3												
33.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
34.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
35.	DINAS KESEHATAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
36.	RSU				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
37.	DINAS SOSIAL				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
38.	DINAS PENDAPATAN				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
39.	BP3AKB				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
40.	RSJ				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
41.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				15			1	1			14	14	4	4	4	4									3								7	7					3												
KABUPATENKOTA																																																				
1.	MATARAM																																																			
2.	LOMBOK BARAT																																																			
3.	LOMBOK TENGAH																																																			
4.	LOMBOK TIMUR																																																			
5.	LOMBOK UTARA																																																			
6.	SUMBAWA BARAT																																																			
7.	SUMBAWA																																																			

Lampiran 2



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . Inspektorat

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
	Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan	22.300.093.729,00	4.687.614.142,25	5.460.014.182,25	5.430.317.982,25	4.251.367.142,25
	Alokasi Belanja Tidak Langsung					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.647.589.049	2.411.897.262	2.411.897.262	2.411.897.262	2.411.897.262
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	9.647.589.049	2.411.897.262	2.411.897.262	2.411.897.262	2.411.897.262
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.292.115.049	1.823.028.762	1.823.028.762	1.823.028.762	1.823.028.762
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.678.251.720	1.419.562.930	1.419.562.930	1.419.562.930	1.419.562.930
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	442.204.466	110.551.117	110.551.117	110.551.117	110.551.117
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	160.631.900	40.157.975	40.157.975	40.157.975	40.157.975
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	434.429.769	108.607.442	108.607.442	108.607.442	108.607.442
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	186.901.000	46.725.250	46.725.250	46.725.250	46.725.250
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	297.915.860	74.478.965	74.478.965	74.478.965	74.478.965
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	91.636.868	22.909.217	22.909.217	22.909.217	22.909.217
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	143.466	35.867	35.867	35.867	35.867
5.1.00.00.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	0	0	0	0	0
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.355.474.000,00	588.868.500,00	588.868.500,00	588.868.500,00	588.868.500,00
5.1.00.00.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.730.014.000,00	432.503.500,00	432.503.500,00	432.503.500,00	432.503.500,00
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	625.460.000,00	156.365.000,00	156.365.000,00	156.365.000,00	156.365.000,00
	Alokasi Belanja Langsung					
5.2	BELANJA LANGSUNG	12.652.504.680,00	2.275.716.880,00	3.048.116.920,00	3.018.420.720,00	1.839.469.880,00
5.2.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	4.419.897.000,00	882.656.520,00	1.323.984.780,00	1.323.984.780,00	882.656.520,00
5.2.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	42.740.000,00	8.548.000,00	12.822.000,00	12.822.000,00	8.548.000,00
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	3.128.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00	3.128.000,00
5.2.01.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.640.000,00	3.128.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00	3.128.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.01.01.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.640.000,00	3.128.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00	3.128.000,00

INSPEKTORAT PROV. NTB

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.01.01.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.100.000,00	5.420.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	5.420.000,00
5.2.01.01.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.600.000,00	3.920.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	3.920.000,00
5.2.01.01.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	7.500.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
5.2.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	239.982.000,00	47.996.400,00	71.994.600,00	71.994.600,00	47.996.400,00
5.2.01.02.1	Belanja Pegawai	11.880.000,00	2.376.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00	2.376.000,00
5.2.01.02.1.01	Honorarium PNS	11.880.000,00	2.376.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00	2.376.000,00
5.2.01.02.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.880.000,00	2.376.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00	2.376.000,00
5.2.01.02.2	Belanja Barang dan Jasa	228.102.000,00	45.620.400,00	68.430.600,00	68.430.600,00	45.620.400,00
5.2.01.02.2.03	Belanja Jasa Kantor	228.102.000,00	45.620.400,00	68.430.600,00	68.430.600,00	45.620.400,00
5.2.01.02.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00
5.2.01.02.2.03.02	Belanja Air	13.200.000,00	2.640.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
5.2.01.02.2.03.03	Belanja Listrik	140.402.000,00	28.080.400,00	42.120.600,00	42.120.600,00	28.080.400,00
5.2.01.02.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	50.500.000,00	10.100.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00	10.100.000,00
5.2.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	169.716.600,00	33.943.320,00	50.914.980,00	50.914.980,00	33.943.320,00
5.2.01.06.2	Belanja Barang dan Jasa	169.716.600,00	33.943.320,00	50.914.980,00	50.914.980,00	33.943.320,00
5.2.01.06.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	169.716.600,00	33.943.320,00	50.914.980,00	50.914.980,00	33.943.320,00
5.2.01.06.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.080.000,00	5.416.000,00	8.124.000,00	8.124.000,00	5.416.000,00
5.2.01.06.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.400.000,00	10.080.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	10.080.000,00
5.2.01.06.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	73.726.600,00	14.745.320,00	22.117.980,00	22.117.980,00	14.745.320,00
5.2.01.06.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.510.000,00	3.702.000,00	5.553.000,00	5.553.000,00	3.702.000,00
5.2.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	78.414.900,00	14.360.100,00	21.540.150,00	21.540.150,00	14.360.100,00
5.2.01.07.1	Belanja Pegawai	72.758.400,00	13.228.800,00	19.843.200,00	19.843.200,00	13.228.800,00
5.2.01.07.1.01	Honorarium PNS	72.758.400,00	13.228.800,00	19.843.200,00	19.843.200,00	13.228.800,00
5.2.01.07.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.758.400,00	13.228.800,00	19.843.200,00	19.843.200,00	13.228.800,00
5.2.01.07.2	Belanja Barang dan Jasa	5.656.500,00	1.131.300,00	1.696.950,00	1.696.950,00	1.131.300,00
5.2.01.07.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.656.500,00	1.131.300,00	1.696.950,00	1.696.950,00	1.131.300,00
5.2.01.07.1.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.656.500,00	1.131.300,00	1.696.950,00	1.696.950,00	1.131.300,00
5.2.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	153.250.100,00	30.650.020,00	45.975.030,00	45.975.030,00	30.650.020,00
5.2.01.08.2	Belanja Barang dan Jasa	24.059.060,00	4.811.812,00	7.217.718,00	7.217.718,00	4.811.812,00
5.2.01.08.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.059.060,00	4.811.812,00	7.217.718,00	7.217.718,00	4.811.812,00
5.2.01.08.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.059.060,00	4.811.812,00	7.217.718,00	7.217.718,00	4.811.812,00
5.2.01.08.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.191.040,00	25.838.208,00	38.757.312,00	38.757.312,00	25.838.208,00
5.2.01.08.2.03.18	Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service	129.191.040,00	25.838.208,00	38.757.312,00	38.757.312,00	25.838.208,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.01.10	Penyedlaan alat tulis kantor	181.981.500,00	36.396.300,00	54.594.450,00	54.594.450,00	36.396.300,00
5.2.01.10.2	Belanja Barang dan Jasa	181.981.500,00	36.396.300,00	54.594.450,00	54.594.450,00	36.396.300,00
5.2.01.10.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.981.500,00	36.396.300,00	54.594.450,00	54.594.450,00	36.396.300,00
5.2.01.10.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.981.500,00	36.396.300,00	54.594.450,00	54.594.450,00	36.396.300,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	92.045.300,00	18.409.060,00	27.613.590,00	27.613.590,00	18.409.060,00
5.2.01.11.2	Belanja Barang dan Jasa	92.045.300,00	18.409.060,00	27.613.590,00	27.613.590,00	18.409.060,00
5.2.01.11.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.045.300,00	18.409.060,00	27.613.590,00	27.613.590,00	18.409.060,00
5.2.01.11.2.06.01	Belanja Cetak	18.690.300,00	3.738.060,00	5.607.090,00	5.607.090,00	3.738.060,00
5.2.01.11.2.06.02	Belanja Penggandaan	59.200.000,00	11.840.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	11.840.000,00
5.2.01.11.2.06.03	Belanja Penjilidan	14.155.000,00	2.831.000,00	4.246.500,00	4.246.500,00	2.831.000,00
5.2.01.12	Penyedlaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.609.400,00	2.921.880,00	4.382.820,00	4.382.820,00	2.921.880,00
5.2.01.12.2	Belanja Barang dan Jasa	14.609.400,00	2.921.880,00	4.382.820,00	4.382.820,00	2.921.880,00
5.2.01.12.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.609.400,00	2.921.880,00	4.382.820,00	4.382.820,00	2.921.880,00
5.2.01.12.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.609.400,00	2.921.880,00	4.382.820,00	4.382.820,00	2.921.880,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	87.000.000,00	17.400.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	17.400.000,00
5.2.01.17.2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	17.400.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	17.400.000,00
5.2.01.17.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.000.000,00	17.400.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	17.400.000,00
5.2.01.17.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.000.000,00	9.400.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	9.400.000,00
5.2.01.17.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
5.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	454.297.200,00	90.859.440,00	136.289.160,00	136.289.160,00	90.859.440,00
5.2.01.18.2	Belanja Barang dan Jasa	454.297.200,00	90.859.440,00	136.289.160,00	136.289.160,00	90.859.440,00
5.2.01.18.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	454.297.200,00	90.859.440,00	136.289.160,00	136.289.160,00	90.859.440,00
5.2.01.18.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	454.297.200,00	90.859.440,00	136.289.160,00	136.289.160,00	90.859.440,00
5.2.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	2.754.040.000,00	550.808.000,00	826.212.000,00	826.212.000,00	550.808.000,00
5.2.01.19.1	Belanja Pegawai	2.754.040.000,00	550.808.000,00	826.212.000,00	826.212.000,00	550.808.000,00
5.2.01.19.1.01	Honorarium PNS	2.623.140.000,00	524.628.000,00	786.942.000,00	786.942.000,00	524.628.000,00
5.2.01.19.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.623.140.000,00	524.628.000,00	786.942.000,00	786.942.000,00	524.628.000,00
5.2.01.19.1.02	Honorarium Non PNS	130.900.000,00	26.180.000,00	39.270.000,00	39.270.000,00	26.180.000,00
5.2.01.19.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	130.900.000,00	26.180.000,00	39.270.000,00	39.270.000,00	26.180.000,00
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	151.820.000,00	30.364.000,00	45.546.000,00	45.546.000,00	30.364.000,00
5.2.01.20.2	Belanja Barang dan Jasa	151.820.000,00	30.364.000,00	45.546.000,00	45.546.000,00	30.364.000,00
5.2.01.20.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.820.000,00	30.364.000,00	45.546.000,00	45.546.000,00	30.364.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.01.20.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.820.000,00	30.364.000,00	45.546.000,00	45.546.000,00	30.364.000,00

INSPEKTORAT PROV. NTB

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	364.441.000,00	15.400.000,00	103.229.500,00	186.802.000,00	59.009.500,00
5.2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	142.076.000,00	0,00	36.520.000,00	105.556.000,00	0,00
5.2.02.07.3	Belanja Modal	142.076.000,00	0,00	36.520.000,00	105.556.000,00	0,00
5.2.02.07.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.320.000,00	0,00	23.320.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	51.766.000,00	0,00	0,00	51.766.000,00	0,00
5.2.02.07.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.166.000,00	0,00	0,00	45.166.000,00	0,00
5.2.02.07.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
5.2.02.07.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	66.990.000,00	0,00	13.200.000,00	53.790.000,00	0,00
5.2.02.07.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	53.790.000,00	0,00	0,00	53.790.000,00	0,00
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	145.365.000,00	0,00	43.609.500,00	58.146.000,00	43.609.500,00
5.2.02.22.2	Belanja Barang dan Jasa	55.365.000,00	0,00	16.609.500,00	22.146.000,00	16.609.500,00
5.2.02.22.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.865.000,00	0,00	11.659.500,00	15.546.000,00	11.659.500,00
5.2.02.22.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	38.865.000,00	0,00	11.659.500,00	15.546.000,00	11.659.500,00
5.2.02.22.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.500.000,00	0,00	4.950.000,00	6.600.000,00	4.950.000,00
5.2.02.22.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	16.500.000,00	0,00	4.950.000,00	6.600.000,00	4.950.000,00
5.2.02.22.3	Belanja Modal	90.000.000,00	0,00	27.000.000,00	36.000.000,00	27.000.000,00
5.2.02.22.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.000.000,00	0,00	27.000.000,00	36.000.000,00	27.000.000,00
5.2.02.22.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	0,00	27.000.000,00	36.000.000,00	27.000.000,00
5.2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	77.000.000,00	15.400.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	15.400.000,00
5.2.02.30.2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	15.400.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	15.400.000,00
5.2.02.30.2.20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	15.400.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	15.400.000,00
5.2.02.30.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.000.000,00	15.400.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	15.400.000,00
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.332.680,00	25.208.536,00	37.312.804,00	37.312.804,00	25.498.536,00
5.2.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	28.490.000,00	5.840.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	6.130.000,00
5.2.05.04.2	Belanja Barang dan Jasa	28.490.000,00	5.840.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	6.130.000,00
5.2.05.04.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.290.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.290.000,00
5.2.05.04.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber	4.290.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.290.000,00
5.2.05.04.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	4.840.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	4.840.000,00
5.2.05.04.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.200.000,00	4.840.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	4.840.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.05.06	<i>Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan kepegawalan</i>	96.842.680,00	19.368.536,00	29.052.804,00	29.052.804,00	19.368.536,00
5.2.05.06.1	Belanja Pegawai	50.820.000,00	10.164.000,00	15.246.000,00	15.246.000,00	10.164.000,00
5.2.05.06.1.01	Honorarium PNS	50.820.000,00	10.164.000,00	15.246.000,00	15.246.000,00	10.164.000,00
5.2.05.06.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.820.000,00	10.164.000,00	15.246.000,00	15.246.000,00	10.164.000,00
5.2.05.06.2	Belanja Barang dan Jasa	46.022.680,00	9.204.536,00	13.806.804,00	13.806.804,00	9.204.536,00
5.2.05.06.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.615.200,00	8.323.040,00	12.484.560,00	12.484.560,00	8.323.040,00
5.2.05.06.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.015.200,00	7.003.040,00	10.504.560,00	10.504.560,00	7.003.040,00
	Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan	6.600.000,00	1.320.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.320.000,00
5.2.05.06.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.407.480,00	881.496,00	1.322.244,00	1.322.244,00	881.496,00
5.2.05.06.2.12.06	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	4.407.480,00	881.496,00	1.322.244,00	1.322.244,00	881.496,00
5.2.06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	130.451.200,00	75.950.600,00	54.500.600,00	0,00	0,00
5.2.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	23.985.500,00	22.717.750,00	1.267.750,00	0,00	0,00
5.2.06.01.1	Belanja Pegawai	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.2	Belanja Barang dan Jasa	2.535.500,00	1.267.750,00	1.267.750,00	0,00	0,00
5.2.06.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.500,00	387.750,00	387.750,00	0,00	0,00
5.2.06.01.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.500,00	387.750,00	387.750,00	0,00	0,00
5.2.06.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
5.2.06.01.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00
5.2.06.01.2.06.03	Belanja Penjilidan	704.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00
5.2.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	62.550.400,00	31.275.200,00	31.275.200,00	0,00	0,00
5.2.06.04.1	Belanja Pegawai	61.050.000,00	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00
5.2.06.04.1.01	Honorarium PNS	61.050.000,00	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00
5.2.06.04.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.050.000,00	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00
5.2.06.04.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.400,00	750.200,00	750.200,00	0,00	0,00
5.2.06.04.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
5.2.06.04.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
5.2.06.04.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	884.400,00	442.200,00	442.200,00	0,00	0,00
5.2.06.04.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.400,00	310.200,00	310.200,00	0,00	0,00
5.2.06.04.2.06.03	Belanja Penjilidan	264.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.06.05	<i>Penyusunan Rencana Kerja SKPD</i>	43.915.300,00	21.957.650,00	21.957.650,00	0,00	0,00
5.2.06.05.1	Belanja Pegawai	43.560.000,00	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00
5.2.06.05.1.01	Honorarium PNS	43.560.000,00	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00
5.2.06.05.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.560.000,00	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00
5.2.06.05.2	Belanja Barang dan Jasa	355.300,00	177.650,00	177.650,00	0,00	0,00
5.2.06.05.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.800,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00
5.2.06.05.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.800,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00
5.2.06.05.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.500,00	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00
5.2.06.05.2.06.02	Belanja Penggandaan	82.500,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00
5.2.06.05.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
5.2.07	<i>Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</i>	40.620.800,00	4.800.000,00	24.980.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
5.2.07.01	<i>Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah</i>	40.620.800,00	6.858.912,50	20.044.062,50	6.858.912,50	6.858.912,50
5.2.07.01.1	Belanja Pegawai	27.435.650,00	6.858.912,50	6.858.912,50	6.858.912,50	6.858.912,50
5.2.07.01.1.01	Honorarium PNS	27.435.650,00	6.858.912,50	6.858.912,50	6.858.912,50	6.858.912,50
5.2.07.01.1.01.06	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	27.435.650,00	6.858.912,50	6.858.912,50	6.858.912,50	6.858.912,50
5.2.07.01.2	Belanja Barang dan Jasa	13.185.150,00	0,00	13.185.150,00	0,00	0,00
5.2.07.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.185.150,00	0,00	13.185.150,00	0,00	0,00
5.2.07.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.185.150,00	0,00	13.185.150,00	0,00	0,00
5.2.20	<i>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>	7.186.762.000,00	1.532.737.250,00	2.053.284.750,00	2.068.893.750,00	1.539.546.250,00
5.2.20.01	<i>Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala</i>	2.765.269.100,00	555.696.570,00	826.937.980,00	826.937.980,00	563.396.570,00
5.2.20.01.1	Belanja Pegawai	52.855.000,00	13.213.750,00	13.213.750,00	13.213.750,00	13.213.750,00
5.2.20.01.1.01	Honorarium PNS	52.855.000,00	13.213.750,00	13.213.750,00	13.213.750,00	13.213.750,00
5.2.20.01.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.855.000,00	13.213.750,00	13.213.750,00	13.213.750,00	13.213.750,00
5.2.20.01.2	Belanja Barang dan Jasa	2.712.414.100,00	542.482.820,00	813.724.230,00	813.724.230,00	550.182.820,00
5.2.20.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.712.414.100,00	542.482.820,00	813.724.230,00	813.724.230,00	550.182.820,00
5.2.20.01.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.635.414.100,00	527.082.820,00	790.624.230,00	790.624.230,00	527.082.820,00
5.2.20.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	15.400.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebljakan KDH	497.240.864,00	99.448.172,80	149.172.259,20	149.172.259,20	99.448.172,80
5.2.20.03.1	Belanja Pegawai	244.200.000,00	48.840.000,00	73.260.000,00	73.260.000,00	48.840.000,00
5.2.20.03.1.01	Honorarium PNS	244.200.000,00	48.840.000,00	73.260.000,00	73.260.000,00	48.840.000,00
5.2.20.03.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	244.200.000,00	48.840.000,00	73.260.000,00	73.260.000,00	48.840.000,00
5.2.20.03.2	Belanja Barang dan Jasa	253.040.864,00	50.608.172,80	75.912.259,20	75.912.259,20	50.608.172,80
5.2.20.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.666.300,00	733.260,00	1.099.890,00	1.099.890,00	733.260,00
5.2.20.03.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.666.300,00	733.260,00	1.099.890,00	1.099.890,00	733.260,00
5.2.20.03.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.607.500,00	3.921.500,00	5.882.250,00	5.882.250,00	3.921.500,00
5.2.20.03.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.607.500,00	3.921.500,00	5.882.250,00	5.882.250,00	3.921.500,00
5.2.20.03.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.767.064,00	45.953.412,80	68.930.119,20	68.930.119,20	45.953.412,80
5.2.20.03.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.821.894,00	22.564.378,80	33.846.568,20	33.846.568,20	22.564.378,80
5.2.20.03.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.945.170,00	23.389.034,00	35.083.551,00	35.083.551,00	23.389.034,00
5.2.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	699.677.795,00	139.677.059,00	201.911.838,50	218.411.838,50	139.677.059,00
5.2.20.06.1	Belanja Pegawai	60.830.000,00	15.207.500,00	15.207.500,00	15.207.500,00	15.207.500,00
5.2.20.06.1.01	Honorarium PNS	60.830.000,00	15.207.500,00	15.207.500,00	15.207.500,00	15.207.500,00
5.2.20.06.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.830.000,00	15.207.500,00	15.207.500,00	15.207.500,00	15.207.500,00
5.2.20.06.2	Belanja Barang dan Jasa	638.847.795,00	124.469.559,00	186.704.338,50	203.204.338,50	124.469.559,00
5.2.20.06.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	638.847.795,00	124.469.559,00	186.704.338,50	203.204.338,50	124.469.559,00
5.2.20.06.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	622.347.795,00	124.469.559,00	186.704.338,50	186.704.338,50	124.469.559,00
5.2.20.03.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
5.2.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	3.224.574.241,00	737.915.448,20	875.262.672,30	874.371.672,30	737.024.448,20
5.2.20.08.1	Belanja Pegawai	1.818.575.000,00	454.643.750,00	454.643.750,00	454.643.750,00	454.643.750,00
5.2.20.08.1.01	Honorarium PNS	1.818.575.000,00	454.643.750,00	454.643.750,00	454.643.750,00	454.643.750,00
5.2.20.08.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.818.575.000,00	454.643.750,00	454.643.750,00	454.643.750,00	454.643.750,00
5.2.20.08.2	Belanja Barang dan Jasa	1.405.999.241,00	283.271.698,20	420.618.922,30	419.727.922,30	282.380.698,20
5.2.20.08.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.298.200,00	2.059.640,00	3.089.460,00	3.089.460,00	2.059.640,00
5.2.20.08.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.298.200,00	2.059.640,00	3.089.460,00	3.089.460,00	2.059.640,00
5.2.20.08.2.02	Belanja Bahan/Material	6.820.000,00	1.364.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00	1.364.000,00
5.2.20.08.2.02.06	Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi	6.820.000,00	1.364.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00	1.364.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.20.08.2.03	Belanja Jasa Kantor	185.182.500,00	38.573.750,00	54.017.500,00	54.017.500,00	38.573.750,00
5.2.20.08.2.03.17	Belanja jasa Publikasi	14.437.500,00	2.887.500,00	4.331.250,00	4.331.250,00	2.887.500,00
5.2.20.08.2.0325	Belanja jasa Penyelesaian Sengketa Hukum	140.000.000,00	28.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	28.000.000,00
5.2.20.08.2.03.31	Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam	30.745.000,00	7.686.250,00	7.686.250,00	7.686.250,00	7.686.250,00
5.2.20.06.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.782.000,00	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00
5.2.20.06.01	Belanja Cetak	1.782.000,00	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00
5.2.20.08.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.621.250,00	19.324.250,00	28.986.375,00	28.986.375,00	19.324.250,00
5.2.20.08.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000,00	1.155.000,00	1.732.500,00	1.732.500,00	1.155.000,00
5.2.20.08.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.846.250,00	18.169.250,00	27.253.875,00	27.253.875,00	18.169.250,00
5.2.20.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.105.295.291,00	221.059.058,20	331.588.587,30	331.588.587,30	221.059.058,20
5.2.20.08.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	978.795.291,00	195.759.058,20	293.638.587,30	293.638.587,30	195.759.058,20
5.2.20.08.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.500.000,00	25.300.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	25.300.000,00
5.2.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	385.000.000,00	86.841.600,00	103.042.400,00	122.889.400,00	72.361.600,00
5.2.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	308.674.000,00	27.374.000,00	96.720.500,00	116.567.500,00	68.147.000,00
5.2.21.01.2	Belanja Barang dan Jasa	308.674.000,00	27.374.000,00	96.720.500,00	116.567.500,00	68.147.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor	13.574.000,00	13.574.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Publikasi	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	36.500.000,00	7.300.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	7.300.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.500.000,00	7.300.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	7.300.000,00
5.2.21.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.900.000,00	0,00	44.770.500,00	64.617.500,00	39.847.000,00
5.2.21.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.900.000,00	0,00	44.770.500,00	64.617.500,00	39.847.000,00
5.2.21.01.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	68.200.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
5.2.21.01.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	68.200.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.21.02	<i>Pelatihan teknis pengawasan dan penllalan akuntabilitas kinerja</i>	76.326.000,00	59.467.600,00	6.321.900,00	6.321.900,00	4.214.600,00
5.2.21.02.2	Belanja Barang dan Jasa	76.326.000,00	59.467.600,00	6.321.900,00	6.321.900,00	4.214.600,00
5.2.21.02.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.623.000,00	18.623.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pengliti/Instruktur/Narasumber	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.03.31	Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.21.02.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.073.000,00	4.214.600,00	6.321.900,00	6.321.900,00	4.214.600,00
5.2.21.02.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.073.000,00	4.214.600,00	6.321.900,00	6.321.900,00	4.214.600,00

INSPEKTORAT PROV. NTB

PROGRAM PRIORITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; 2. Meminimalisasi Dampak Globalisasi; dan 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.	1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis	Angka kriminalitas	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
							Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		Satuan Polisi Pamong Praja
							Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan PERDA	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
					Angka kriminalitas	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase siswa yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, PMS dan Narkoba		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Penguatan Kelembagaan PUG dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka kriminalitas	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penegakan PERDA	Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
					Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Sosial	Program Jaminan Sosial	Persentase pemberian jaminan sosial bagi korban bencana sosial dan bencana alam	Persen	Dinas Sosial
					Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Siaga Darurat Bencana	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Terhadap Siaga Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Program Tanggap Darurat Bencana	Persentase penangaan darurat bencana domain (kekerangan, banjir dan tanah longsor)	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase mitigasi struktural dan non struktural	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana	Persentase masyarakat yang tanggap darurat dalam menghadapi bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural dan non struktural) dan terekonstruksi (struktural)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Persentase Relawan dalam mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian dengan langkah yang tepatguna dan berdaya guna	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Pengembangan komunikasi, informasi dan Media massa kebencanaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebencanaan Semakin Mantab		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
					Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Personil Satpol PP dalam Bencana Alam		Satuan Polisi Pamong Praja
							Program Pemberdayaan Kesadaraan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman	Masyarakat yang diberdayakan		Satuan Polisi Pamong Praja
					Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti pembekalan wawasan kebangsaan	Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
							Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Cakupan masyarakat yang dibina		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
							Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kapasitas pembinaan wawasan kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan 5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	2	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat termasuk peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Pengangguran terbuka	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Keselamatan dan perlindungan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Tingkat Pengangguran terbuka	Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Tingkat Pengangguran terbuka	Administrasi Pemerintahan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		Biro Kesejahteraan Rakyat
							Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	Persen	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Tingkat Pengangguran terbuka	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan Perempuan yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang Aspek Urusan Pemerintah		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pekerja Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan pelatih yang bersertifikasi		Dinas Pemuda dan Olahraga
							Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet dan atlet berprestasi		Dinas Pemuda dan Olahraga
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana pemuda dan prasarana olahraga yang terstandar	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Administrasi Pemerintahan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		Biro Kesejahteraan Rakyat
			3	Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat						
			4	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Pengembangan Komunikasi Informasi & Mass Media	Meningkatnya jumlah Media untuk penyebaran informasi pembangunan NTB ke masyarakat		Biro Humas dan Protokol

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Kerjasama Informasi dengan mass media	Tersebarluasnya informasi publik terkait program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Media Cetak dan Elektronik baik lokal dan nasional		Biro Humas dan Protokol
					Peningkatan Kapasitas PAD	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan kepala Daerah Internal	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh penilaian IKM		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
							Program Optimalisasi Pemanfaatan Pemanfaatn Teknologi Informasi	Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras teknologi informasi pendapatan, persentase pengelola sentra berkompetensi Informasi Teknologi (IT)		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
							Program Reformasi Birokrasi	Rasio cakupan sentra layanan per hari kerja, persentase Sentra Layanan yang memperoleh Sertifikasi ISO		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Statistik	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persen	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral	NTB Satu Data		Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
						Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sebaran komunitas informasi	Persen	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
							Program Kerjasama Informasi dengan Media Publik	Persentase penyebaran informasi yang berkualitas	Persen	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
							Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Nasional Keterbukaan Informasi Publik		Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
							Program Pengembangan e-Government	Level Kematangan (Maturity Level) Tata Kelola TIK Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI)		Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
							Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel	Persen	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
							Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi		Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
						Persandian	Program Optimalisasi Tata Kelola Persandian	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Informasi	Persen	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
					Pertumbuhan PAD	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Meningkatnya kinerja BUMD sebagai sektor penyumbang PAD		Biro Perekonomian
					Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data dan informasi, kajian investasi daerah, Pengendalian inflasi, dan indikator ekonomi lainnya		Biro Perekonomian
					Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD dan LKPD Tepat Waktu, dan Mempertahankan Opini WTP		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penetapan Perda APBD Kabupaten/Kota dan Penyampaian LKPD Kab/Kota tepat waktu		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen / arsip yang terselamatkan	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan layanan informasi kearsipan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Peningkatan SDM Pengelola		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Record Centre	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Reformasi Birokrasi	Persentase pelanggaran pegawai (Tingkat Penanganan Disiplin Aparatur)	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Kepegawaian	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN		Badan Kepegawaian Daerah
							Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Predikat Kepatuhan LHKPN		Badan Kepegawaian Daerah
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Daerah yang tertata	Persen	Biro Organisasi
							Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	Persentase Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang dimanfaatkan	Persen	Biro Organisasi
							Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	Biro Organisasi
							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase inovasi pelayanan publik terimplementasi	Persen	Biro Organisasi

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase Tingkat Disiplin ASN	Persen	Biro Organisasi
							Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Biro Organisasi
							Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	Biro Organisasi
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Perencanaan	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/Pergub		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Program perencanaan sosial dan budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan SDA		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Pengawasan	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		Inspektorat
							Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Level Maturitas SPIP Pemda		Inspektorat
							Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	Inspektorat

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Inspektorat
							Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	Inspektorat
							Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda		Inspektorat
							Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Inspektorat
							Program Peningkatan Profesionalisme APIP	Persentase APIP yang bersertifikat Auditor dan P2UPD	Persen	Inspektorat
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD		Biro Pemerintahan
							Program Penataan daerah otonomi baru	Persentase daerah yang tertata	Persen	Biro Pemerintahan
							Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Kecamatan yang memperoleh ranking		Biro Pemerintahan
							Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pertanahan	Persentase Pelaksanaan Tertib Administrasi di bidang Pemerintahan dan Pertanahan	Persen	Biro Pemerintahan
							Program Peningkatan kerjasama antar daerah	Cakupan kerjasama antar daerah.		Biro Pemerintahan
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Mutu Sumber daya Aparatur			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Aparatur pemdes yang terlatih	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Persen	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Badan Penghubung Daerah

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Biro Umum
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase program/kegiatan yang terlaksana	Persen	Biro Adminsitasi Pembangunan dan LPBJP Provinsi NTB
							Program Percepatan Pembangunan	Meningkatnya kualitas pembangunan provinsi NTB		Biro Adminsitasi Pembangunan dan LPBJP Provinsi NTB
							Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terintegrasi program-program Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan pembangunan		Biro Adminsitasi Pembangunan dan LPBJP Provinsi NTB
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang terukur, efisien, dan berkualitas		Biro Adminsitasi Pembangunan dan LPBJP Provinsi NTB
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tertata		Biro Hukum
							Program Bantuan Hukum	Persentase Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Persen	Biro Hukum
					Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		Biro Humas dan Protokol
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris; 2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia; 3. Penanggulangan Kemiskinan	5	Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat	Angka Kemiskinan	Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	Dinas Sosial
							Program Jaminan Sosial	Persentase pemberian jaminan sosial bagi korban bencana sosial dan bencana alam	Persen	Dinas Sosial

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase balai yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial (eks PSK, Gepeng, dan penyakit sosial lainnya)	Persen	Dinas Sosial
							Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta korban trauma yang dibina	Persen	Dinas Sosial
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KK Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil yang tertangani	Persen	Dinas Sosial
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	Dinas Sosial
							Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terbina	Persen	Dinas Sosial
							Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan pelayanan sosial dasar dalam balai.	Persen	Dinas Sosial
					Angka Kemiskinan	Transmigrasi	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terlaksananya Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Angka Kemiskinan	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	Biro Kesejahteraan Rakyat
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		Biro Kesejahteraan Rakyat
					Angka Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase PKK Aktif	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Angka Kemiskinan	Pertanian	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penurunan Ternak yang terinfeksi PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	Persen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Peningkatan populasi ternak		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Pemasaran Produk Olahan Peternakan		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya pemanfaatan hasil samping pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak berkualitas		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			6	Berkurangnya kesenjangan antar wilayah						
			7	Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi	Proporsi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (1)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (2)	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan (3)	Tersedianya informasi jalan dan jembatan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
					Indeks Fatalitas	Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal/Dermaga Penyebrangan/Fasilitas Prasarana Perhubungan Darat		Dinas Perhubungan
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	Persen	Dinas Perhubungan
							Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan yang Layak	Persen	Dinas Perhubungan
							Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase fasilitas keselamatan yang terpasang dibandingkan dengan kebutuhan	Persen	Dinas Perhubungan
							Program Peningkatan Manajemen Transportasi	Persentase Konektivitas Transportasi	Persen	Dinas Perhubungan
							Program Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, darat/terminal	Jumlah penumpang/barang /kendaraanmelalui dermaga/bandara/terminal		Dinas Perhubungan
4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	(1). Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; (2.) Mencegah dan Memberantas Korupsi; (3.) Memberantas Tindakan Pennebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (4.) Memberantas Narkoba dan Psikotropika; (5.) Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan (6.) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal	1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis						

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	(1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja	8	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka usia harapan hidup	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan
							Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	Dinas Kesehatan
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persen	Dinas Kesehatan
							Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan (%)	Persen	Dinas Kesehatan
							Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	Dinas Kesehatan
							Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 jenis tenaga kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	Dinas Kesehatan
							Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan	Persen	Dinas Kesehatan
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Habis Pakai	Persen	Dinas Kesehatan

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Persen	Dinas Kesehatan
					Angka usia harapan hidup	Kesehatan	Program Obat dan Pebejalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	Persen	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Habis Pakai	Persen	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
							Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Persen	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
							Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan	Persen	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
					Angka usia harapan hidup	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
							Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
							Program Pengadaan ; Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Habis Pakai	Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan	Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
					Angka usia harapan hidup	Kesehatan	Program Upaya kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Habis Pakai	Persen	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
							Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Persen	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
							Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan	Persen	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
					Angka usia harapan hidup	Administrasi Pemerintahan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase kasus penyakit menular dalam setahun	Persen	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Angka usia harapan hidup		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Menurunnya angka penggunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		Biro Kesejahteraan Rakyat
					Angka usia harapan hidup	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia kawin pertama yang paling baik bagi perempuan (Usia 21 - 30 tahun)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program pengembangan pusat yan informasi & konseling KRR	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan dimasyarakat	Cakupan PUS (istri dibawah 20 tahun)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber-KB		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase balita gizi buruk	Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		Dinas Kesehatan
					Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan		Dinas Ketahanan Pangan
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan		Dinas Ketahanan Pangan
			9	Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendidikan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Ratio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah dan SLB	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Pembinaan Ketenagaan	-Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah, Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV, Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Angka Partisipasi Kasar SD/MI, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar PAUD, Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs, Angka DO SD/MI, Angka DO SMP/MTs		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data Pokok Pendidikan dan kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Angka DO		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase sekolah yang memanfaatkan bahan ajar berbasis TIK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka melek huruf	Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Angka melek huruf	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya fasilitas peribadatan Islamic Center (10)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			10	Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya proporsi Rumah Layak Huni (RLH)	Perumahan Rakyat dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya cakupan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi NTB		Dinas Perumahan dan Permukiman
			11	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	Perumahan Rakyat dan Permukiman	Program pengembangan Permukiman	Persentase permukiman yang tertata	Persen	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Akses Sanitasi Layak	Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses sanitasi dasar	Persen	Dinas Kesehatan
					Akses Air Minum Layak	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah	Cakupan Air Bersih Perdesaan		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
					Akses Air Minum Layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (4)	Tersedianya cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	(1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perko-taan; (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar; (4) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; (5) Memperkuat Peran Investasi; (6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; (7) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi; (8) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; (9) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional; (10) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan (11) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016	12	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Pertumbuhan Ekonomi	Administrasi Pemerintahan	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Tersedianya data dan informasi perekonomian untuk pengambilan kebijakan		Biro Perekonomian
						Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data dan informasi, kajian investasi daerah, Pengendalian inflasi, dan indikator ekonomi lainnya		Biro Perekonomian
					Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif dan RAT	Persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
							Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Dan Berkembangnya Kualifikasi Wirausaha		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
							Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Pertumbuhan Ekonomi	Perdagangan	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Pertumbuhan kelompok pedagang/ usaha informal		Dinas Perdagangan
							Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha dan Mitra		Dinas Perdagangan
					Pertumbuhan Ekonomi	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya hasil kajian investasi daerah, indikator keuangan dan pola kemitraan investasi daerah		Biro Perekonomian
							Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Meningkatnya pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal		Biro Perekonomian
					Pertumbuhan Ekonomi	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pertumbuhan Ekonomi	Tenaga Kerja	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pertumbuhan Ekonomi	Perdagangan	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan jumlah negara tujuan ekspor		Dinas Perdagangan
							Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan		Dinas Perdagangan
							Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Perlindungan Hukum Kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang di tangani	Persen	Dinas Perdagangan

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
					Pertumbuhan Ekonomi	Perindustrian	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan IKM yang Terbina dalam Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Dinas Perindustrian
							Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan IKM yang terbina		Dinas Perindustrian
							Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan IKM yang Menerapkan Teknologi dalam Proses Produksi		Dinas Perindustrian
							Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan		Dinas Perindustrian
							Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Cakupan Kerjasama antar daerah dan Kab/Kota		Dinas Perindustrian
							Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis Ovop (One Village One Product)	Cakupan IKM Berbasis OVOP (One Village One Product)		Dinas Perindustrian
							Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan IKM dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah		Dinas Perindustrian
							Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan	Meningkatnya Kualitas Kemasan Produk IKM		Dinas Perindustrian
					Laju inflasi	Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok yang stabil antar waktu antar wilayah		Dinas Perdagangan
			13	Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif	Meningkatnya Kunjungan wisatawan	Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase penguatan potensi pasar domestik dan mancanegara	Persen	Dinas Pariwisata
					Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya sarpras destinasi pariwisata yang memenuhi standar		Dinas Pariwisata
							Program Pengembangan Kemitraan	Standarisasi kompetensi SDM penunjang layanan kepariwisataan		Dinas Pariwisata

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Penguatan kualitas atraksi dan event pariwisata		Dinas Pariwisata
					Meningkatnya Kunjungan wisatawan	Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Terlaksananya penyebaran informasi dan promosi potensi daerah NTB		Badan Penghubung Daerah
					Meningkatnya Kunjungan wisatawan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi dan selaras		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang aman, nyaman, dan produktif		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kawasan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Sektor	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Terwujudnya Implementasi jasa konstruksi yang optimal		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Terwujudnya pelayanan dan hasil uji material bangunan sesuai standar		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
			14	Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, lombok as Eco City (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ)	Nilai Tukar Petani	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Nilai Tukar Petani	Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani (NTP)		Dinas Pertanian dan Perkebunan
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas tanaman pertanian / perkebunan per hektar		Dinas Pertanian dan Perkebunan
							Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase target teknologi pertanian / perkebunan yang diterapkan	Persen	Dinas Pertanian dan Perkebunan
							Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Pertanian / Perkebunan yang diberdayakan	Persen	Dinas Pertanian dan Perkebunan
							Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani		Dinas Pertanian dan Perkebunan
					Nilai Tukar Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Budidaya	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Tangkap	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan		Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	(i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara	13	Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif						
			15	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya hayati	Luas kawasan hutan yang terlindungi	Lingkungan Hidup	Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Penerapan SMART PATROL pada unit manajemen		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
							Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			16	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayaagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Hutan	Berkembangnya komoditi kehutanan		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Mempertahankan kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Program Analisis dan Pengendalian Lingkungan	Rasio ketataatan terhadap dokumen lingkungan		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
							Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	Tersedianya kebijakan yang berbasis pengelolaan lingkungan		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			17	Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah NTB	Rasio Elektrifikasi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terwujudnya peningkatan rumah tangga yang menggunakan listrik		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan ESDM yang Efektif dan Efisien		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
			18	Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pencegahan kerusakan lingkungan	Persentase situs geologi yang terlindungi	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			19	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan	Meningkatnya PDRB	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase layanan hari besar keagamaan	Persen	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial		Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Melakukan revolusi karakter bangsa		20	Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase layanan hari besar keagamaan	Persen	Biro Kesejahteraan Rakyat
			21	Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan sektor kebudayaan terhadap PAD	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
							Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		22	Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan	Perencanaan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

TTD

H.M. ZAINUL MAJDI

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
Inspektorat				13.078.799.800	
Inspektorat				13.078.799.800	
Program Peningkatan Profesionalisme APIP	Persentase Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bersertifikat Auditor dan P2UPD			290.070.000	
01. Pelatihan Pengembangan APIP	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	Dalam dan Luar Provinsi	100 orang	240.740.000	APBD I
02. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Bimtek	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	49.330.000	APBD I
Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			222.251.200	
01. Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	189.435.600	APBD I
02. Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	32.815.600	APBD I
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda			360.860.900	

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
01. Review Lakip Pemda	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Kegiatan	25.045.300	APBD I
02. Evaluasi Lakip PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi SAKIP	se-NTB	1 Kegiatan	126.765.300	APBD I
03. Fasilitasi kegiatan RB	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	18.275.600	APBD I
04. Pembangunan Zona Integritas pada PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona Integritas	se-NTB	1 Kegiatan	18.245.300	APBD I
05. Penilaian PD	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	se-NTB	1 Kegiatan	22.880.300	APBD I
06. Reviu RPJMD	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	24.592.300	APBD I
07. Review Renstra	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	25.045.300	APBD I
08. Review Renja	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	24.945.300	APBD I
09. Review RKPD	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	25.075.600	APBD I
10. Review KUA PPAS	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	24.945.300	APBD I
11. Review RKA	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	25.045.300	APBD I
Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat			3.107.872.600	
01. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	se-NTB	10 Kegiatan	303.655.600	APBD I

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
02. Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan tertentu/Khusus	se-NTB	10 Tahun	303.175.600	APBD I
03. Fasilitas Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Kegiatan	429.789.500	APBD I
04. Kegiatan SABER PUNGLI	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Kegiatan	900.652.500	APBD I
05. Unit Gratifikasi	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Kegiatan	18.411.900	APBD I
06. Kegiatan TP4D	Jumlah Kegiatan Pendampingan	se-NTB	1 Kegiatan	1.152.187.500	APBD I
Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			1.673.971.300	
01. Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi	se-NTB	1 Kegiatan	75.798.000	APBD I
02. Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Kegiatan	26.818.000	APBD I
03. Pemeriksaan Reguler/ Audit Kinerja (Audit Operasional)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler/audit kinerja (Audit Operasional)	se-NTB	1 Kegiatan	1.571.355.300	APBD I
Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			1.664.809.100	
01. Kegiatan Gelas Pengawasan Daerah (LARWASDA)	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	26.795.300	APBD I
02. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan	Dalam dan Luar Provinsi	1 Kegiatan	709.100.000	APBD I
03. Kegiatan TPTGR	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	621.397.600	APBD I
04. Kegiatan Sidang Majelis TPTGR	Jumlah Kegiatan	Dalam dan Luar Provinsi	1 Kegiatan	307.516.200	APBD I

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Level Maturitas SPIP Pemda			165.818.800	
01. Pendampingan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	58.327.600	APBD I
02. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP	se-NTB	1 Kegiatan	58.215.600	APBD I
03. Evaluasi PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG	se-NTB	1 Kegiatan	49.275.600	APBD I
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP			71.835.600	
01. Telahaan Sejawat	Jumlah Kegiatan Telaah Sejawat	se-NTB	1 Kegiatan	71.835.600	APBD I

TABEL T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM / Standar / Nas	IKK	Target Renstra Inspektorat Provinsi NTB				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Persentase Aparatur Pengawas yang Fungsional Auditor.	-	-	30%	37,56%	45%	86,5%	46,67 %	55,00 %	45%	86,5%	-
2	Persentase Aparatur Pengawas yang Fungsional P2UPD.	-	-	30%	37,56 %	45%	47%	37,50 %	52,50 %	45%	47%	-
3	Persentase PD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP.	-	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	Opini BPK.	-	IKK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
5	Persentase PD yang menerapkan SPIP.	-	IKK	56,81%	76,56%	100%	85%	70,45 % (31 PD)	66,66 % (30 PD)	100%	85%	-
6	Tingkat Maturitas Pemda NTB.	-	IKK	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 4	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 4	-
7	Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.	-	IKK	50%	60%	70%	75%	77,20%	67,01 %	70%	75%	-
8	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	-	IKK	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00%	22,45 %	62,50 %	80,00 %	80,00%	-
9	Tingkat Kapabilitas APIP.	-	IKK	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	-
10	Persentase Penilaian PD yang Memuaskan.	-	IKK	11,36 %	22,22 %	33,33 %	85%	19,05 %	71,11 %	33,33 %	85%	-
11	Hasil Nilai PMPRB NTB.	-	IKK	60	60	60	62	50	60,52	60	62	-

12	Persentase PD yang membangun WBK/WBBM/Zona Integritas	-	IKK	2,22 %	4,4 %	8,9 %	10%	0%	8,88 %	8,9 %	10%	-
13	Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD rata-rata > 60.	-	IKK	68,18 %	80,00 %	100%	70%	70,09 %	26,67 %	100%	70%	-
14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.	-	IKK	60	65	70	65	60,56	65	70	65	-

KTORAT PROV. NTB

TABEL T.C. 30
Pencapaian Kinerja PelayananPerang
Provinsi Nusa Tenggara

No	Indikator	SPM / Standar / Nas	IKK	Target Renstra Inspektorat Provir		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Level Kapabilitas APIP	-	IKK	Level 2	Level 3	Level 3
2	Level Maturitas Pemda NTB	-	IKK	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 3
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	-	IKK	50%	60%	70%
4	Opini Pemerintah Daerah	-	IKK	WTP	WTP	WTP
5	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	-	IKK	80,00 %	80,00 %	80,00 %
6	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda	-	IKK	60	65	70
7						
8	Persentase APIP yang bersertifikat Auditor dan P2UPD					

5	Persentase PD yang menerapkan SPIP.	-	IKK	56,81%	76,56%	100%
8	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	-	IKK	80,00 %	80,00 %	80,00 %
10	Persentase Penilaian PD yang Memuaskan.	-	IKK	11,36 %	22,22 %	33,33 %
11	Hasil Nilai PMPRB NTB.	-	IKK	60	60	60
12	Persentase PD yang membangun WBK/WBBM/Zona Integritas	-	IKK	2,22 %	4,4 %	8,9 %
13	Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD rata-rata > 60.	-	IKK	68,18 %	80,00 %	100%

EKTORAT PROV. NTB

)

**kat Daerah Inspektorat
ra Barat**

[illegible]

85%	70,45 % (31 PD)	66,66 % (30 PD)	100%	85%	-
80,00%	22,45 %	62,50 %	80,00 %	80,00%	-
85%	19,05 %	71,11 %	33,33 %	85%	-
62	50	60,52	60	62	-
10%	0%	8,88 %	8,9 %	10%	-
70%	70,09 %	26,67 %	100%	70%	-

EKTORAT PROV. NTB

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Re
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
4.02.01	Inspektorat				13.078.799.800			
4.02.01.01	Inspektorat				13.078.799.800			
4.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit Kerja Inspektorat	100%	4.729.088.300			
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Item Barang / Jasa yang diadakan	Unit Kerja Inspektorat	5 Item	79.035.000	APBD I		
	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Item yang dibayarkan	Unit Kerja Inspektorat	5 Item	250.402.000	APBD I		
	06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Item Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit Kerja Inspektorat	4 Item	183.614.000	APBD I		
	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Item Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Unit Kerja Inspektorat	2 Item	76.175.800	APBD I		
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Item Penyediaan Jasa Kebrsihan Kantor	Unit Kerja Inspektorat	2 Item	194.095.100	APBD I		
	10. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Penyediaan Alat Tulis Kantor	Unit Kerja Inspektorat	1 Item	195.726.700	APBD I		
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit Kerja Inspektorat	3 Item	145.995.500	APBD I		
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit Kerja Inspektorat	1 Item	16.583.000	APBD I		
	17. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Item Penyediaan Makanan dan Minuman	Unit Kerja Inspektorat	2 Item	150.000.000	APBD I		
	18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Rapat / Konsultasi	Luar Provinsi	30 Kegiatan	459.000.000	APBD I		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Re
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan	se-NTB	5 Laporan	242.461.200	APBD I		
	27. Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	2.736.000.000	APBD I		
4.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit Kerja Inspektorat	100%	395.381.000			
	07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Barang/Jasa yang diadakan	Unit Kerja Inspektorat	18 Barang	119.381.000	APBD I		
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	4 Kegiatan	215.000.000	APBD I		
	30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah Barang yang dilakukan pemeliharaan	Unit Kerja Inspektorat	61 Unit	61.000.000	APBD I		
4.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti lmtaq, Senam dan Menyusun Dupak	Unit Kerja Inspektorat	100%	144.200.000			
	04. Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	2 Kegiatan	40.900.000	APBD I		
	06. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan	Unit Kerja Inspektorat	2 Dokumen	103.300.000	APBD I		
4.02.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan	Unit Kerja Inspektorat	100%	215.713.000			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Unit Kerja Inspektorat	1 Dokumen	88.645.000	APBD I		
	04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan	Unit Kerja Inspektorat	4 Dokumen	73.920.000	APBD I		
	05. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Unit Kerja Inspektorat	3 Dokumen	53.148.000	APBD I		
4.02.01.01.07.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	Unit Kerja Inspektorat	100%	36.928.000			
	01. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Dokmen Laporan	Unit Kerja Inspektorat	2 Dokumen	36.928.000	APBD I		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Re
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.02.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme APIP	Persentase Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bersertifikat Auditor dan P2UPD	Unit Kerja Inspektorat	60%	290.070.000			
	01. Pelatihan Pengembangan APIP	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	Dalam dan Luar Provinsi	100 orang	240.740.000	APBD I		
	02. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Bimtek	Unit Kerja Inspektorat	6 Kegiatan	49.330.000	APBD I		
4.02.01.01.22.	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemprov NTB	Peringkat 6	222.251.200			
	01. Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah Kegiatan	10 Kab/Kota se - NTB	10 Kegiatan	189.435.600	APBD I		
	02. Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	3 Kegiatan	32.815.600	APBD I		
4.02.01.01.23.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda	Pemprov NTB	BB (sangat Baik)	360.860.900			
	01. Review Lakip Pemda	Jumlah Kegiatan	Pemerintah Prov. NTB	1 Kegiatan	25.045.300	APBD I		
	02. Evaluasi Lakip PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi SAKIP	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	126.765.300	APBD I		
	03. Fasilitasi kegiatan RB	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	1 Kegiatan	18.275.600	APBD I		
	04. Pembangunan Zona Integritas pada PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona Integritas	Prangkat Daerah Prov. NTB	6 PD	18.245.300	APBD I		
	05. Penilaian PD	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	22.880.300	APBD I		
	06. Reviu RPJMD	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	1 Kegiatan	24.592.300	APBD I		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Re
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07. Review Renstra	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	25.045.300	APBD I		
	08. Review Renja	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	24.945.300	APBD I		
	09. Review RKPD	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	1 Kegiatan	25.075.600	APBD I		
	10. Review KUA PPAS	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	1 Kegiatan	24.945.300	APBD I		
	11. Review RKA	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	1 Kegiatan	25.045.300	APBD I		
4.02.01.01.24.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Prov. NTB	85%	3.107.872.600			
	01. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Inspektorat Prov. NTB	30 Pengaduan	303.655.600	APBD I		
	02. Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan tertentu/Khusus	Prangkat Daerah Prov. NTB	10 PD	303.175.600	APBD I		
	03. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan	Prangkat Daerah Prov. NTB	15 Kegiatan	429.789.500	APBD I		
	04. Kegiatan SABER PUNGLI	Jumlah Kegiatan	Inspektorat Prov. NTB	20 Kegiatan	900.652.500	APBD I		
	05. Unit Gratifikasi	Jumlah Kegiatan	Inspektorat Prov. NTB	5 Kegiatan	18.411.900	APBD I		
	06. Kegiatan TP4D	Jumlah Kegiatan Pendampingan	Inspektorat Prov. NTB	10 Kegiatan	1.152.187.500	APBD I		
4.02.01.01.25.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemprov NTB	WTP	1.673.971.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Re
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01. Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asestensi	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	75.798.000	APBD I		
	02. Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan	Pemprov NTB	1 Kegiatan	26.818.000	APBD I		
	03. Pemeriksaan Reguler/ Audit Kinerja (Audit Operasional)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler/audit kinerja (Audit Operasional)	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	1.571.355.300	APBD I		
4.02.01.01.26.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Inspektorat Prov. NTB	70%	1.664.809.100			
	01. Kegiatan Gelas Pengawasan Daerah (LARWASDA)	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	1 Kegiatan	26.795.300	APBD I		
	02. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan	Dalam dan Luar Provinsi	7 Kegiatan	709.100.000	APBD I		
	03. Kegiatan TPTGR	Jumlah Kegiatan	Unit Kerja Inspektorat	3 Kegiatan	621.397.600	APBD I		
	04. Kegiatan Sidang Majelis TPTGR	Jumlah Kegiatan	Dalam dan Luar Provinsi	3 Kegiatan	307.516.200	APBD I		
4.02.01.01.27.	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Level Maturitas SPIP Pemda	Pemprov NTB	Level IV	165.818.800			
	01. Pendampingan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	58.327.600	APBD I		
	02. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	58.215.600	APBD I		
	03. Evaluasi PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG	Prangkat Daerah Prov. NTB	45 PD	49.275.600	APBD I		
4.02.01.01.28.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Unit Kerja Inspektorat	Level IV	71.835.600			
	01. Telaahan Sejawat	Jumlah Kegiatan Telaah Sejawat	Inspektorat Prov. NTB	2 Kegiatan	71.835.600	APBD I		

ncana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INSPEKTORAT PROV. NTB

ncana Tahun 2019	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
10	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INSPEKTORAT PROV. NTB

ncana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INSPEKTORAT PROV. NTB

ncana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INSPEKTORAT PROV. NTB

ncana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INSPEKTORAT PROV. NTB

FORMAT USULAN STANDAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Satuan	Harga 2018 (Rp.)	Usulan Harga Tahun 2019 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Penilaian Angka Kredit Jafung Auditor / Jafung P2UPD				
	- Pembina	OK	700.000,00	800.000,00	
	- Pengarah Umum	OK	600.000,00	700.000,00	
	- Pengarah Teknis Administrasi	OK	600.000,00	700.000,00	
	- Ketua	OK	600.000,00	700.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	450.000,00	600.000,00	
	- Sekretaris	OK	400.000,00	500.000,00	
	- Anggota	OK	400.000,00	450.000,00	
2	Kegiatan Retensi Arsip/Pemusnahan Arsip	OH	150.000,00	175.000,00	
3	Penyusunan Pergup Jakwas	OB	2.000.000,00	0,00	
	- Pengarah	OB	0,00	3.000.000,00	
	- Ketua	OB	0,00	2.500.000,00	
	- Sekretaris	OB	0,00	2.250.000,00	
	- Anggota	OB	0,00	2.000.000,00	
4	Penyusunan RENJA	OH	200.000,00	300.000,00	
5	Penyusunan RKAP / RKA	OH	200.000,00	250.000,00	
6	Tim Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut atas LHP BPK RI dan APIP di SKPD Lingkup Provinsi NTB				
	- Pengarah	OB	300.000,00	400.000,00	
	- Penanggung Jawab	OB	275.000,00	300.000,00	
	- Ketua	OB	250.000,00	275.000,00	
	- Wakil Ketua	OB	225.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris	OB	200.000,00	225.000,00	
	- Koordinator	OB	150.000,00	200.000,00	
	- Staf Sekretariat	OB	100.000,00	150.000,00	
7	Tenaga Admin dan Inputer Aplikasi Sistem Administrasi Pemantuan Tindak Lanjut				

No.	Uraian	Satuan	Harga 2018 (Rp.)	Usulan Harga Tahun 2019 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	- Koordinator	OB	300.000,00	400.000,00	
	- Administrator	OB	300.000,00	350.000,00	
	- Inputer	OB	300.000,00	300.000,00	
8	Honorarium Penyusunan Dokumen	OB	2.000.000,00	0,00	
	- Penanggung Jawab	OB	0,00	3.000.000,00	
	- Ketua	OB	0,00	2.500.000,00	
	- Sekretaris	OB	0,00	2.250.000,00	
	- Anggota	OB	0,00	2.000.000,00	
9	Honorarium Jasa Pengelola Komputer/Jasa Administrasi/Jasa Receptionis OPD dan Aplikasi Lainnya				
	- Teknisi Komputer	OB	0,00	Upah Minimum Pemerintah	
	- Jasa Administrasi	OB	0,00	Upah Minimum Pemerintah	
	- Jasa Receptionis	OB	0,00	Upah Minimum Pemerintah	

Mataram, Maret 2018
INSPEKTUR PROVINSI NTB,

IBNU SALIM, SH.,M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681231 199403 1 070